



**EVALUASI RUMAH TANGGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DAN
PENENTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN PENERIMA
MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
MENGUNAKAN *PROXY MEANS TEST***

OLEH

**MUNAWAR ASIKIN
6605012142**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Magister Sains Ekonomi
Pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia**

DEPOK, 2008

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Munawar Asikin

NPM : 6605012142

Kekhususan : Ekonomi Publik

Judul Tesis : Evaluasi Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Penentuan Rumah Tangga Sangat Miskin Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Menggunakan *Proxy Means Test*

Depok, Juni, 2008

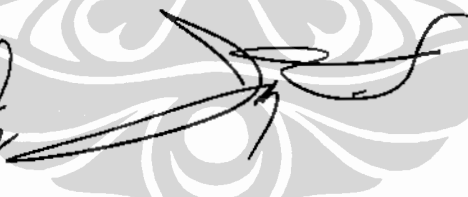
Penguji/
Pembimbing Tesis

Ketua Tim
Penguji

Penguji



Dr. Djoni Hartono



Dr. Jossy P Moeis
NIP: 131 884 896



Dr. Mahyus Ekananda. MSE



Ketua Program Studi

Dr. Arindra A. Zainal
NIP. 131 473 822

ABSTRAK TESIS

EVALUASI RUMAH TANGGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DAN PENENTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MENGGUNAKAN *PROXY MEANS TEST*

MUNAWAR ASIKIN
6605012142

Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Klasifikasi JEL : C68, D30, R13, R48
Kata Kunci : 1. Bantuan Langsung Tunai
2. Pendataan Sosial Ekonomi
3. Program Keluarga Harapan
4. *Proxy Means Test*

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT Sangat Miskin dalam Program PKH.

Cakupan penelitian ini adalah 4 dari 7 propinsi sasaran program PKH Tahap 1, yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Data yang digunakan adalah Susenas 2006, Potensi Desa (PODES) 2005, dan Data Penerima BLT 2005 serta Garis Kemiskinan 2006. Penentuan rumah tangga miskin penerima BLT berdasarkan Garis Kemiskinan 2006 yang telah diturunkan sebesar 16 persen.

Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (*leakage*) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT.

Model 1 menunjukkan bahwa terjadi salah sasaran (*leakage*) sebesar 0,10 persen di Propinsi Nusa Tenggara Timur (setara dengan 748 juta), sebesar 7,60 persen di Sulawesi Utara (setara dengan 12 milyar), sebesar 8,40 persen di Gorontalo (setara dengan 10 milyar), dan sebesar 15,20 persen di DKI Jakarta (setara dengan 29 milyar).

Model 2 menunjukkan bahwa terjadi salah sasaran (*leakage*) sebesar 6,80 persen di Propinsi Nusa Tenggara Timur (setara dengan 51 milyar), sebesar 18,30 persen di Sulawesi Utara (setara dengan 27 milyar), sebesar 40,30 persen di Gorontalo (setara dengan 50 milyar), dan sebesar 56,00 persen di DKI Jakarta (setara dengan 107 milyar).

Model 3 menunjukkan bahwa terjadi salah sasaran (*leakage*) sebesar 5,20 persen di Propinsi Nusa Tenggara Timur (setara dengan 38 milyar), sebesar 26,40 persen di Sulawesi Utara (setara dengan 40 milyar), sebesar 43,30 persen di Gorontalo (setara dengan 55 milyar), dan sebesar 56,00 persen di DKI Jakarta (setara dengan 107 milyar).

Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan *targeting* rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat.



KATA PERSEMBAHAN

Semua Indah pada waktunya

Kupersembahkan tesis ini untuk Istri tercinta serta Anakku Rahmat Fadhli Reza serta Ibunda yang dengan kasih sayang mereka dan kesabaran mereka mendukungku dalam penyelesaian tesis ini serta senantiasa mereka mendoakan dan memohon kehadiratNya untuk segala kemudahan atas segala jerih payahku menuntut ilmu di kampus tercinta Universitas Indonesia.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas perkenanNya, saya dapat menyelesaikan tugas penelitian untuk tesis saya berjudul “Evaluasi Rumah Tangga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Penentuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan *Proxy Means Test* (PMT)”. Penggunaan Model PMT diadopsi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE) 2005 yang dilaksanakan dalam penentuan rumah tangga penerima BLT.

Yang membedakan tulisan ini dengan hasil kegiatan PSE 2005 secara keseluruhan di BPS adalah penelitian ini justru dapat mengevaluasi bahwa rumah tangga penerima BLT yang diteliti tidak seluruhnya benar-benar rumah tangga yang layak menerima bantuan langsung tunai. Ini menunjukkan bahwa pemodelan yang selama ini dilakukan di BPS dalam penentuan rumah tangga miskin masih harus terus diperbaharui sehingga tingkat ketelitian penentuan sasaran dapat terus ditingkatkan.

Kegiatan perkuliahan saya di Universitas Indonesia adalah atas keinginan sendiri (izin belajar). Dalam perjalanan perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang telah membantu baik secara materil maupun imateril yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah S2 di Universitas Indonesia.

Agar terus terkenang atas jasa-jasa mereka saya dengan rendah hati menyebutkan satu per satu nama-nama mereka:

1. Bapak Arizal Ahnaf, MA, selaku Deputy Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik yang telah mengizinkan saya kuliah atas keinginan sendiri (ketika saya mengajukan surat untuk ijin belajar masih menjabat sebagai Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik).
2. Bapak Dr. Djoni Hartono, selaku pembimbing yang dengan kesabaran dan perhatiannya saya akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini (permohonan maaf saya sampaikan kepada Bapak karena saya tidak bisa menyelesaikan model CGE ketika pertama kali mengajukan proposal tesis).
3. Seluruh pejabat struktural dan teman-teman sekantor di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, yang merelakan saya cukup menjadi “panitia saja” dalam keseluruhan kegiatan pelatihan Instuktur Nasional Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS); seharusnya saya menjadi instruktur utama (intama) dengan tugas mengajar di kelas ketika pelatihan SUSENAS

dilaksanakan (sehingga dengan budi baik mereka semua saya masih dapat kuliah meskipun harus bolak balik Bogor – Jakarta).

4. Bapak Dr. Suryamin, MSc - selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - yang sangat mendukung saya dalam penyelesaian tesis ini, sehingga saya mendapat keluasaan waktu dalam penyelesaian tesis.
5. Dosen penguji yaitu Bapak Dr. Jossy P. Moeis serta Bapak Dr. Mahyus Ekananda, M.SE. yang telah memberikan saran dan kritikan atas tesis ini.
6. Bapak Dr. Nachrowi Djalal Nachrowi yang mengeritik tentang Garis Kemiskinan BPS dan beberap konsep Lapangan Usaha ketika Seminar Tesis dilaksanakan.
7. Ibu Dr. Titi Kanti Lestari, M.Comm atas budi baiknya membaca tesis saya sebelum diujikan serta beberapa koreksinya yang sangat membangun.
8. Seluruh teman-teman sealmamater pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia terutama Ahmad Avenzora, Rustam, Lisnawati, Ardi, Mas Abdirizal yang telah *mensupport* saya dengan buku-buku, program, serta persiapan ujian tesis dan komprey.
9. Teristimewa untuk Kang Hendro dari World Bank atas budi baiknya memberikan pinjaman data set yang lengkap serta program-programnya.
10. Staf sekretariat jurusan serta semua orang yang berkontribusi namun tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Semoga budi baik mereka dapat menjadi pemicu saya untuk juga berbuat kebaikan bagi sesama terutama dalam bersama-sama meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu ekonomi.

Depok, Juni 2008

Penulis

Munawar Asikin

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	iii
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Hipotesa	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Ruang Lingkup	12
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN LITERATUR	14
2.1 Konsep Kemiskinan	14
2.2 Perkiraan Tingkat Kemiskinan	17
2.3 Penyebab Kemiskinan	20
2.4 Studi Tentang Kemiskinan Di Indonesia	24
2.5 Pengukuran <i>Outcome Targeting</i>	27
2.6 Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005	28
2.7 <i>Proxy Means Test</i>	30
2.8 Penggunaan PMT di Beberapa Negara	31
2.9 Program Keluarga Harapan	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	37
3.2 Metodologi Penelitian	37
3.2.1 Penentuan Rumah Tangga Miskin Untuk Model PMT	37
3.2.2 Merging Data RTM Susenas Kor 2006 dengan PODES 2005	38
3.2.3 Spesifikasi Model Untuk Tujuan 1 dan 2	40
3.2.4 Spesifikasi Model Untuk Tujuan 3	43

3.3 Metode Estimasi.	47
3.3.1 Metode Estimasi OLS	47
3.3.2 Uji Hipotesis	47
3.4 Post Estimate.....	50
3.5 Garis Kemiskinan 2006 Revisi dan Penentuan Salah Sasaran.	51
3.6 Mengukur Indikator Kemiskinan.....	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Tingkat Kemiskinan 2005-2006	56
4.2 Perbandingan Beberapa Karakteristik Kemiskinan	56
4.3 Hasil Estimasi	61
4.4 Analisis Tingkat Keakuratan Sasaran	75
4.5 Analisis Indikator Kemiskinan Data BLT	76
4.6 Besarnya Uang Yang Salah Sasaran	77
4.7 Keterbatasan Penelitian	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

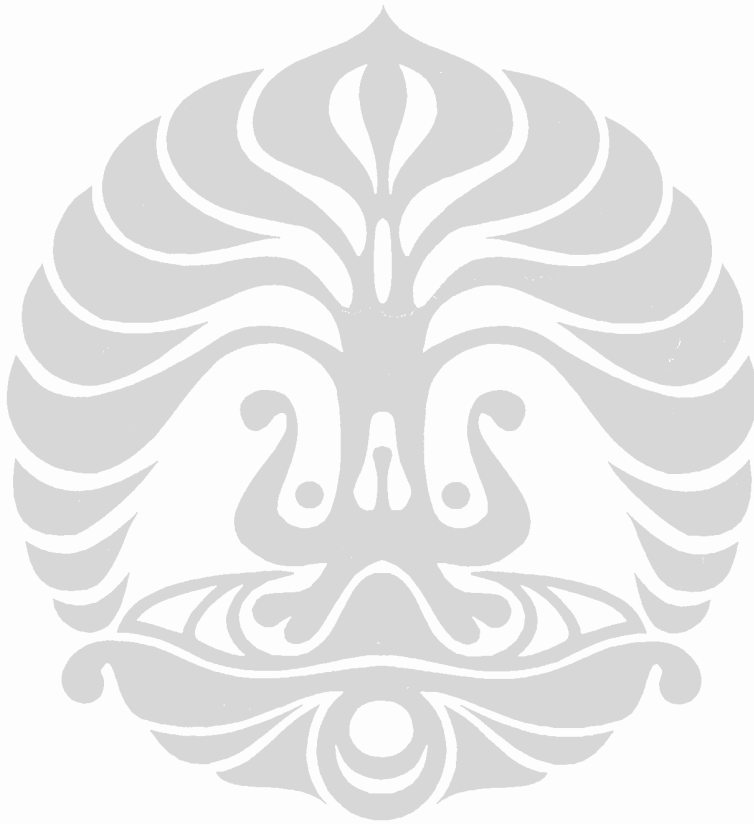
	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Rumah Tangga Penerima BLT Menurut Propinsi dan Kategori 3
Tabel 2.1	Outcome dari Targeting 29
Tabel 3.1	Garis Kemiskinan 2006 Menurut Daerah di Empat Propinsi 40
Tabel 3.2	Jumlah Rumah Tangga Untuk MODEL PMT 42
Tabel 3.3	Klasifikasi Variabel Susenas Kor 2006 Untuk Model 1 43
Tabel 3.4	Klasifikasi Variabel Susenas Kor 2006 Untuk Model 2 45
Tabel 3.5	Klasifikasi Variabel Susenas Kor 2006 Untuk Model 3 48
Tabel 3.6	Garis Kemiskinan 2006 Revisi Menurut Daerah di Empat Propinsi 48
Tabel 3.7	Jumlah Rumah Tangga Penerima BLT dan Anggaran BLT di Empat Propinsi 54
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi dan Daerah 2005-2006 59
Tabel 4.2	Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi dan Daerah 2005-2006 59
Tabel 4.3a	Indeks Keadalaman dan Kemiskinan di Perkotaan 2005 dan 2006 60
Tabel 4.3b	Indeks Keadalaman dan Kemiskinan di Perdesaan 2005 dan 2006 61
Tabel 4.3c	Indeks Keadalaman dan Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan 2005 dan 2006 61
Tabel 4.4a	Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi dan Jenis Kelamin 62
Tabel 4.4b	Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi dan Jenis Kelamin 62
Tabel 4.5	Nilai Adjusted R ² Menurut Propinsi dan Model 69
Tabel 4.6a	Model 1 Propinsi DKI Jakarta 64
Tabel 4.6b	Model 2 Propinsi DKI Jakarta 65
Tabel 4.6c	Model 3 Propinsi DKI Jakarta 66
Tabel 4.7a	Model 1 Propinsi Nusa Tenggara Timur 68
Tabel 4.7b	Model 2 Propinsi Nusa Tenggara Timur 69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.7c Model 3 Propinsi Nusa Tenggara Timur	70
Tabel 4.8a Model 1 Propinsi Sulawesi Utara	71
Tabel 4.8b Model 2 Propinsi Sulawesi Utara	72
Tabel 4.8c Model 3 Propinsi Sulawesi Utara	73
Tabel 4.9a Model 1 Propinsi Gorontalo	74
Tabel 4.9b Model 2 Propinsi Gorontalo	75
Tabel 4.9c Model 3 Propinsi Gorontalo	75
Tabel 4.10 Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin Penerima BLT Yang Terpilih Untuk Program Bantuan PKH Tahap I	76
Tabel 4.11 Tingkat Kebocoran Pada Pemberian BLT 2005 Menurut Propinsi dan Model	78
Tabel 4.12 Indikator Kemiskinan Data Rumah Tangga Penerima BLT Menurut Propinsi dan Model	79
Tabel 4.13 Besarnya RT dan Uang Salah Sasaran Pemberian BLT 2005 Menurut Propinsi dan Model	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Analisis Untuk Menjawab Tujuan Pertama dan Tujuan Kedua	41
Gambar 3.2 Kerangka Analisis Untuk Menjawab Tujuan Ketiga	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan 1 Oktober 2005 pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kenaikan harga BBM tersebut tidak dapat dipungkiri akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia atau dengan kata lain kenaikan BBM pasti membebani masyarakat miskin. Meskipun dikonsumsi dalam porsi yang relatif kecil oleh golongan masyarakat miskin dibandingkan dengan golongan pendapatan yang lebih tinggi, tetap saja kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan jumlah orang miskin. Studi LPEM FEUI menyatakan bahwa kenaikan BBM pada awal Maret 2005 akan meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,24% dan penyelewengan dana kompensasi BBM akan mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,55% (M. Ikhsan, et. al, 2005). Menurut Ikhsan, tujuan kebijakan penarikan subsidi BBM sangat positif, walaupun ada pro dan kontra dari masyarakat dengan alasan adanya dampak inflatoir yang menurunkan daya beli masyarakat serta kenaikan harga BBM akan selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga barang secara luas (inflasi). Badan Pusat Statistik (BPS) - menggunakan data Susenas Modul Konsumsi 2006 – juga telah menunjukkan bukti empiris bahwa akibat kenaikan BBM 1 Oktober 2005, angka kemiskinan naik sebesar 6,36 persen yaitu dari 16,69 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 17,75 persen pada 2006. Angka kemiskinan di Indonesia memang relatif fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sejak terjadinya krisis moneter pada medio 1997¹.

¹ Catatan resmi dari BPS per 1 Juli 2008 adalah adanya penurunan angka kemiskinan pada tahun 2008 yaitu dari 16,6 persen pada Maret 2007 menjadi 15,4 persen pada Maret 2007.

Untuk mengurangi beban pada masyarakat miskin akibat kenaikan BBM 1 Oktober 2005, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12/2005 tentang pemberian Bantuan langsung tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin². Untuk mendapatkan rumah tangga yang akan mendapatkan BLT, dibutuhkan informasi tentang keberadaan mereka beserta nama kepala rumah tangga, dan alamatnya. Direktori rumah tangga miskin belum pernah tersedia ketika itu meskipun BPS secara rutin sejak 1984 mengeluarkan angka kemiskinan. Akhirnya Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan yang dikenal dengan nama Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE 2005)³. PSE 2005 merupakan suatu pendataan yang menghasilkan suatu Direktori Rumah Tangga Miskin (DRTM) penerima BLT tahun 2005-2006.

DRTM yang dihasilkan melalui PSE 2005 ini adalah database tentang rumah tangga miskin terbesar sepanjang sejarah pengumpulan data kemiskinan di Indonesia. DRTM - yang berisi daftar nama kepala rumah tangga, alamat serta karakteristik rumah tangga miskin ini - terdiri dari 19,1 juta rumah tangga penerima BLT atau sekitar 60 jutaan penduduk di seluruh Indonesia. Rumah tangga hasil kegiatan PSE 2005 kemudian mendapatkan BLT sejak Oktober 2005 hingga Nopember 2006 melalui kantor pos setempat yang anggarannya disalurkan oleh Menteri Sosial.

Besarnya uang BLT yang telah disalurkan dalam kurun waktu tersebut adalah sebanyak 22,9 triliun dimana Jawa Barat (2,905,217 RTM), Jawa Tengah (3,171,201 RTM), dan Jawa Timur (3,236,880 RTM) merupakan 3 propinsi dengan jumlah rumah

² BLT atau *unconditional cash transfer* (UCT) merupakan subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin berupa uang tunai. Nilai uang yang ditransfer kepada rumah tangga miskin sebesar Rp 100 ribu untuk setiap rumah tangga per bulannya.

³ PSE 2005 dikenal pula dengan sebutan Sensus Kemiskinan karena semua rumah tangga miskin yang ada di Indonesia dicacah seluruhnya.

tangga penerima BLT terbesar. Jumlah rumah tangga penerima BLT per 30 Mei 2006 menurut catatan BPS adalah seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1:
Jumlah Rumah Tangga Penerima BLT Menurut Propinsi dan Kategori

No	Propinsi	Kategori			Jumlah
		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	92.519	208.774	195.745	497,038
2	SUMATERA UTARA	181.755	342.655	420.562	944,972
3	SUMATERA BARAT	101.189	123.592	87.859	312,640
4	RIAU	71.917	126.075	95.715	293,707
5	JAMBI	33.309	77.676	88.753	199,738
6	SUMATERA SELATAN	148.119	265.846	269.216	683,181
7	BENGKULU	47.863	67.518	48.555	163,936
8	LAMPUNG	211.943	342.777	230.321	785,041
9	KEP BANGKA BELITUNG	8.391	18.692	6.569	33,652
10	KEPULAUAN RIAU	14.233	27.502	31.944	73,679
11	DKI JAKARTA	23.651	70.316	66.513	160,480
12	JAWA BARAT	615.875	1.065.439	1.223.903	2,905,217
13	JAWA TENGAH	348.893	1.544.513	1.277.795	3,171,201
14	DI YOGYAKARTA	39.439	130.079	105.592	275,110
15	JAWA TIMUR	518.468	1.763.373	955.039	3,236,880
16	BANTEN	108.106	219.497	374.446	702,049
17	BALI	44.507	70.705	31.832	147,044
18	NUSA TENGGARA BARAT	181.729	259.907	125.969	567,605
19	NUSA TENGGARA TIMUR	137.233	297.997	187.907	623,137
20	KALIMANTAN BARAT	101.687	98.345	160.873	360,905
21	KALIMANTAN TENGAH	71.633	62.872	62.968	197,473
22	KALIMANTAN SELATAN	76.446	62.609	106.893	245,948

Tabel 1.1:
Jumlah Rumah Tangga Penerima BLT Menurut Propinsi dan Kategori

No	Propinsi	Kategori			Jumlah
		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	KALIMANTAN TIMUR	53.109	92.395	82.591	228,095
24	SULAWESI UTARA	32.543	60.773	33.979	127,295
25	SULAWESI TENGAH	84.620	83.837	42.916	211,373
26	SULAWESI SELATAN	186.215	238.042	170.709	594,966
27	SULAWESI TENGGARA	39.591	117.366	124.383	281,340
28	GORONTALO	41.385	37.871	23.475	102,731
29	SULAWESI BARAT	29.687	60.647	21.568	111,902
30	MALUKU	37.457	98.463	46.921	182,841
31	MALUKU UTARA	26.979	22.072	16.303	65,354
32	IRIAN JAYA BARAT	26.936	40.626	59.956	127,518
33	PAPUA	156.887	138.138	191.832	486,857
JUMLAH		3.894.314	8.236.989	6.969.602	19.100.905

Sumber: BPS, 2007b

Terlepas dari pro dan kontra tentang manfaat BLT, sesungguhnya BLT merupakan satu dari beberapa program kompensasi pengurangan subsidi BBM yang telah banyak dilaksanakan oleh negara-negara lainnya. Program sejenis BLT juga pernah diterapkan di negara lain, seperti program *food stamp* di Amerika Serikat misalnya.

Salah satu kritik terbesar dari kebijakan pemberian BLT adalah masalah bantuan yang salah sasaran. Ini disebabkan karena banyak pihak tidak percaya bahwa pemerintah memiliki data yang valid soal jumlah penduduk miskin yang layak menerima BLT. Beberapa koran ibu kota seperti Republika, Kompas, dan lain-lain menampilkan gambar beberapa penerima BLT yang menggunakan *hand phone* atau

membawa motor ketika datang ke kantor pos untuk mengambil uang BLT untuk menunjukkan adanya salah sasaran dalam pemberian BLT.

BPS sendiri menyadari akan kelemahan penentuan rumah tangga miskin penerima BLT. Menurut mimeo yang disusun oleh Dr. Hamonangan Ritonga, et al berjudul "*Metodologi Penentuan Rumah Tangga Miskin PSE 2005*", ketidakakuratan data PSE adalah sebesar 20% yang didasarkan pada perbandingan Model PMT menggunakan Analisis Regresi Logistik⁴. Pada Model ini, penimbang 14 variabel penentu rumah tangga miskin dibedakan untuk setiap kabupaten/kota. Jadi setiap daerah mempunyai penimbang dan variabel daerah khusus (*local specific variable*) berdasarkan determinan kemiskinan di daerah masing-masing. Dalam aplikasinya, penentuan RTM di BPS dilakukan dengan pertimbangan target anggaran serta *expert judgment*. Satu hal penting yang patut dicatat dalam penentuan RTM penerima BLT ini adalah tidak menggunakan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan, karena data ini tidak dikumpulkan dalam pelaksanaan PSE 2005.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2004-2009, salah satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui program penanggulangan kemiskinan, dengan target mengurangi angka kemiskinan (absolut) menjadi 8,2 persen pada akhir tahun 2009. Agar target ini dapat dicapai, pemerintah telah merumuskan suatu strategi pembangunan ekonomi holistik yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan nama *Triple Track Strategy* 2004-2009, yaitu strategi ekonomi yang:

⁴ Wapres sendiri dalam satu pernyataannya menyatakan bisa terjadi salah sasaran sebesar 25% karena pemerintah tidak hanya membantu rumah tangga sangat miskin dan rumah tangga miskin, namun juga memberikan bantuan BLT pada rumah tangga hampir miskin. Rumah tangga hampir miskin ini adalah rumah tangga yang berada di atas Garis Kemiskinan yang dinaikkan 20%.

- 1) *Pro-Growth*: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan investasi dan ekspor;
- 2) *Pro-Employment*: Menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja;
- 3) *Pro-Poor*: Merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan serta beberapa program lain yang langsung menyentuh masyarakat miskin.

Triple Track Strategy ini menjadi landasan dari empat pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007, yaitu:

- (1). Mendorong pertumbuhan yang berkualitas;
- (2). Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar;
- (3). Pemberdayaan masyarakat;
- (4). Penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial..

Sebagai wujud realisasi dari kebijakan penanggulangan kemiskinan ini, Pemerintah salah satunya melakukan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. PKH merupakan program lanjutan dari BLT namun dengan syarat tertentu, sehingga PKH disebut juga sebagai Bantuan Tunai Bersyarat (BTB, *Conditional Cash Transfer* atau CCT)

Program PKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut, yaitu: 1) ada balita (bayi usia dibawah 5 tahun), 2) ada anak usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama (usia antara 5-17 tahun), dan 3) ada wanita hamil usia 10-49 tahun.

Untuk jangka pendek, bantuan tunai bersyarat yang diberikan melalui PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM yang memenuhi kriteria PKH. Namun demikian, RTSM yang menerima bantuan tunai tersebut dipersyaratkan untuk secara rutin memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan, dan menyekolahkan anak usia 5-17 tahun ke sekolah dasar (SD) atau ke sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di wilayah kecamatan tempat tinggal RTSM tersebut.

Untuk jangka panjang, PKH mempunyai tujuan pembangunan kapabilitas dasar manusia sehingga terjadi pemotongan rantai pewarisan kemiskinan antar generasi. Dalam kerangka tersebut, program ini juga dirancang untuk mempercepat pencapaian penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan mengurangi kasus pekerja anak dan mempercepat pencapaian Millennium Development Goals (MDGs). Pengalaman negara-negara lain yang telah mengimplementasikan program sejenis menunjukkan perbaikan yang lebih cepat pada indikator kemiskinan multidimensi, sehingga kelompok sasaran program ini diperuntukkan terutama bagi rumah tangga dengan kemiskinan kronis.

PKH berlangsung dalam jangka panjang. Masing-masing Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria PKH akan menerima bantuan selama 6 (enam) tahun, dan selanjutnya apabila memenuhi syarat diharapkan dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah. Selama tahun 2007-2015 total jumlah penerima bantuan tunai bersyarat melalui PKH berkisar 6,5 juta RTSM, dengan jumlah RTSM dan pemilihan daerah dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama PKH akan mencakup propinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk membagikan paket PKH kepada penerima manfaat jika tidak tersedia data basis yang tepat (*base line data*).

Untuk itu, data basis BLT hasil PSE dapat dijadikan dasar untuk penentuan sasaran rumah tangga yang akan menerima bantuan.

Berdasarkan urian di atas, penelitian ini akan difokuskan pada dua hal yaitu evaluasi rumah tangga penerima BLT dan penentuan rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang akan mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007.

Evaluasi rumah tangga penerima BLT dilakukan untuk mengetahui apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah rumah tangga miskin. Jika ya, maka berarti seluruh data BLT dapat digunakan untuk penentuan rumah tangga penerima program PKH. Jika tidak berarti terjadi salah sasaran. Jika seluruh rumah tangga penerima BLT adalah rumah tangga yang tepat menerima bantuan, kebutuhan selanjutnya adalah penentuan rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang akan menjadi penerima bantuan PKH.

1.2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

PSE 2005 mengumpulkan 14 variabel atau karakteristik rumah tangga miskin dalam bentuk kualitatif. Keempat belas variable tersebut berkaitan dengan kondisi tempat tinggal meliputi luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum dan penerangan utama; jenis bahan bakar untuk masak; frekuensi rumah tangga membeli daging/ayam/susu dalam satu minggu; frekuensi makan sehari; banyaknya pakaian baru yang bisa dibeli dalam setahun; kemampuan berobat ke puskesmas bila sakit; lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendidikan tertinggi kepala keluarga; serta kepemilikan barang bernilai paling sedikit Rp 500 ribu. Dalam penentuan RTM penerima BLT tidak diterapkan model Foster-Greer-Thorbecke

(FGT)⁵ menggunakan Garis Kemiskinan seperti yang selama ini dilakukan BPS, namun menggunakan teknik skoring menggunakan 14 variabel tersebut.

Sejak 1984, metodologi penentuan rumah tangga miskin di Indonesia selalu didasarkan pada Garis Kemiskinan (GK) yang telah dihitung oleh BPS menggunakan data SUSENAS Modul Konsumsi. Suatu rumah tangga dikatakan miskin jika nilai pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan di bawah GK, sebaliknya dikatakan tidak miskin jika nilai pengeluaran per kapita sebulan sama dengan atau di atas GK⁶.

Patut diketahui bahwa menggunakan garis kemiskinan ini kemudian dihitung rumah tangga miskin, namun jumlah rumah tangga miskin yang datanya berasal dari SUSENAS ini hanya dapat menggambarkan besaran jumlah dan persentase penduduk miskin pada level propinsi dan nasional saja, namun tidak dapat menunjukkan dimana lokasi rumah tangga miskin berada.

Data penerima BLT yang dikumpulkan dalam PSE 2005 dapat digunakan karena informasi keberadaan RTM sudah tersedia. Namun sayangnya dalam PSE 2005 data pengeluaran rumah tangga tidak dikumpulkan, sehingga perlu dihitung nilai pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan untuk menentukan status kemiskinan mereka; tentu saja dengan menggunakan patokan garis kemiskinan tertentu. Pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan dari rumah tangga penerima BLT perlu dihitung untuk kondisi tahun 2006 agar dapat diketahui apakah mereka berada di bawah, sama dengan, atau di atas garis kemiskinan.

Pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan dihitung dengan menggunakan *Proxy Means Test (PMT)*. Dalam hal ini, pemilihan variabel-variabel yang dipakai untuk menghitung pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan untuk PKH didasarkan

⁵ Penjelasan tentang FGT dapat dilihat pada sub bab 3.6 pada halaman 53.

⁶ Rumah tangga yang pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan sama dengan (tepat berada pada) GK dikategorikan tidak miskin karena mereka dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar.

pada variabel-variabel yang dipakai dalam PSE 2005. Karena kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor lokasi (akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi), maka perlu dilihat pula pengaruh lokasi (*locational effect*) dalam mengestimate pengeluaran rumah tangga di suatu daerah.

Jadi dalam hal ini, permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah:

1. Mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?
2. Jika terjadi salah sasaran, berapa persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut?
3. Bagaimana mengembangkan model untuk menentukan Rumah Tangga Sangat Miskin dalam Program PKH?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Menghitung pengeluaran rumah tangga BLT untuk mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin.
2. Jika terjadi salah sasaran, menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut.
3. Mengembangkan model untuk menentukan Rumah Tangga Sangat Miskin dalam Program PKH.

1.4. Hipotesa

Dari permasalahan dan tujuan penelitian serta melihat ketersediaan data yang ada, maka hipotesis penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel yang digunakan dalam penentuan rumah tangga penerima BLT dengan tingkat kemiskinan rumah tangga;
2. Adanya perbedaan pengaruh antara variabel terhadap kemiskinan maka akan mempengaruhi estimasi pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan.

Untuk membuktikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah rumah tangga miskin, perlu dibuat suatu model yang dapat menghitung pengeluaran rumah tangga pada data BLT. Model yang digunakan disebut dengan *Proxy Means Test* yang digunakan BPS pada penentuan RTM PSE 2005. Metode Estimasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan OLS pada Model Regresi. Selanjutnya untuk menentukan RTSM untuk PKH dilakukan pula dengan model PMT dengan mempertimbangkan variabel-variabel terkait dengan infrastruktur dan sarana pra sarana seperti keberadaan sarana pendidikan, kesehatan, jalan, dan pasar.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah, *pertama*, pemerintah dapat mengetahui dengan lebih tepat rumah tangga miskin sasaran penerima bantuan tunai bersyarat (BTB) atau program PKH. *Kedua*, pemerintah mengetahui apakah data yang digunakan dalam PKH mengandung kesalahan berupa *undercoverage* atau *leakage*. *Ketiga*, pemerintah dapat mereduksi biaya kegiatan pendataan karena sejumlah kecil variabel yang nyata mempengaruhi kemiskinan sudah diketahui dalam model PMT sehingga ketika melakukan verifikasi cukup dengan menanyakan beberapa variable pokok saja,

Untuk bidang ilmu ekonomi di Indonesia, penelitian ini akan meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran serta meningkatkan efektivitas pemberian bantuan

pada masyarakat miskin sehingga tingkat kesejahteraan mereka tidak terpuruk meskipun terjadinya kebijakan pemerintah berupa kenaikan BBM.

Untuk bidang ilmu ekonomi publik, sebagai *major* ilmu saya, manfaat penelitian ini adalah sangat berguna bagi saya dalam mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam kaitannya bagaimana mengalokasikan anggaran ke pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan jumlah rumah tangga miskin yang ada, serta memberikan masukan adanya kebocoran (*leakage*) anggaran akibat adanya rumah tangga yang salah sasaran.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah 4 propinsi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Pemilihan propinsi ini didasarkan pada karakteristik rumah tangga miskin di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta DKI Jakarta sebagai pembanding. Data yang digunakan adalah Susenas Kor 2006, Potensi Desa (PODES) 2005, data penerima BLT 2005 serta Garis Kemiskinan 2006.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam studi ini akan terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN** yang menerangkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, hipotesa, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II TINJAUAN LITERATUR, menerangkan mengenai konsep kemiskinan, perkiraan tingkat kemiskinan, penyebab kemiskinan, studi tentang kemiskinan di Indonesia, pengukutan outcome targeting, Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005, *Proxy Means Test*, penggunaan PMT di beberapa Negara, dan Program Keluarga Harapan.
- BAB III METODOLOGI PENELITIAN menerangkan mengenai bagaimana menentukan ruang lingkup dan batasan penelitian, metode penelitian, metode estimasi, *post estimate*, Garis Kemiskinan 2006 Revisi, dan mengukur indikator kemiskinan.
- BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, menerangkan mengenai analisis model dan hasil simulasi dari PMT.
- BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, menguraikan kesimpulan dari analisis penelitian dan saran/rekomendasi untuk kebijakan pemberian bantuan bagi rumah tangga miskin

BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1. Konsep Kemiskinan

Pengertian kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai gejala ekonomi dan sebagai gejala sosial. Kemiskinan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang terjadi di sekitar lingkungan penduduk miskin dan biasanya dikaitkan dengan masalah kekurangan pendapatan. Sebaliknya kemiskinan sebagai gejala sosial lebih banyak terletak dalam diri penduduk miskin itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku dan sebagainya (Esmara, 1986: 286). Cara pandang dalam menentukan kemiskinan dapat dilihat dari luar penduduk miskin, yang dilakukan oleh ahli atau institusi, dan menurut penduduk miskin itu sendiri.

2.1.1. Menurut Ahli/ Institusi

Kemiskinan adalah suatu “keadaan kekurangan”. Keadaan kekurangan tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dari dimensi ekonomi, para ahli membedakan keadaan kekurangan atas kekurangan secara absolut dan relatif.

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum sehingga memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Bila sekiranya tingkat pendapatan tidak dapat mencapai tingkat kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Ini berarti diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum sehingga memungkinkan orang atau keluarga tersebut memperoleh kebutuhan dasarnya. Dengan perkataan lain kemiskinan dapat diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga

tersebut dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Sehingga dengan demikian tingkat pendapatan minimum akan merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin, atau disebut sebagai garis kemiskinan. Konsep inilah yang dikenal sebagai kemiskinan absolut (Esmara, 1986: 287).

Todaro (1997: 237) lebih mempertajam komponen apa saja yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar minimum. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan perangkat kebutuhan dasar minimum merupakan suatu konsep yang mudah dipergunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemiskinan.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah pendapatan seseorang yang sudah berada di atas garis kemiskinan, namun relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang bersifat struktural, yakni kebijaksanaan pembangunan pemerintah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Dalam konsep ini kemiskinan tidak akan hilang selagi ditemui ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan konsep kemiskinan relatif secara implisit akan terlihat bahwa “kemiskinan akan selalu berada di antara kita”. Dalam

setiap waktu akan selalu terdapat x% dari jumlah penduduk yang dapat dikategorikan ke dalam golongan miskin. Sehingga berbeda dengan konsep kemiskinan absolut, jumlah orang miskin tidak mungkin habis sepanjang zaman (Esmara, 1986: 294).

Sementara Kuncoro (1997: 102) mendefinisikan kemiskinan relatif sebagai pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Saat ini kemiskinan relatif tidak hanya merujuk kepada ketidaksaan pendapatan, tetapi juga dari segi non ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, politik dan sebagainya. Oleh sebab itu, Seers (dalam Taifur, 2005: 18-19), mengistilahkan kemiskinan relatif sebagai *social deprivation*. Menurut konsep ini, seseorang dikatakan miskin secara relatif tidak dapat dihilangkan, kecuali pendapatan dibagikan sama rata kepada seluruh golongan masyarakat.

2.1.2 Menurut Penduduk Miskin Sendiri

Pada awal tahun 1990an Bank Dunia mulai melakukan studi tentang kemiskinan yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pokok dalam kemiskinan. Studi ini didukung oleh data kuantitatif seperti garis kemiskinan, karakteristik sosial demografi penduduk miskin dan kondisi ekonomi mereka. Untuk melengkapi data statistik tentang kemiskinan, Bank Dunia juga melakukan pendekatan melalui pelaku utama dari kemiskinan, yaitu penduduk miskin itu sendiri, dengan *Participatory Poverty Assessment (PPA)*.

PPA merupakan proses penelitian partisipatif dalam memahami kemiskinan melalui persepsi seluruh pelaku yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, serta melibatkan mereka secara langsung dalam perencanaan dan usaha penanggulangan kemiskinan. Pelaku utama yang dilibatkan dalam studi ini adalah penduduk miskin itu

sendiri. Selain itu PPA juga melibatkan pengambil kebijakan (pemerintah) dari seluruh level serta lembaga sosial (Narayan, et al., 2002 : 15)

PPA mampu menangkap informasi yang umumnya tidak didapatkan oleh studi yang lain. Terdapat dua alasan yang mendasari pernyataan tersebut. Pertama, tidak seperti survei konvensional, daftar pertanyaan yang digunakan dalam PPA tidak ditetapkan sebelumnya. Metode yang biasa dipakai adalah penggunaan daftar pertanyaan yang tidak terstruktur dan grup diskusi. Dengan cara ini dimungkinkan untuk mengetahui isu kemiskinan yang penting bagi masyarakat tetapi mungkin tidak penting untuk diketahui oleh peneliti. Kedua, PPA dapat mencatat ketidaksimetrisan kekuatan yang ada didalam rumah tangga dan di dalam masyarakat. Di dalam survei, biasanya rumah tangga dijadikan sebagai fokus dan unit analisis, sementara di dalam PPA laki-laki dan perempuan dianggap kelompok sosial yang berbeda serta memiliki keinginan yang berbeda pula. Dengan demikian PPA dapat memunculkan kekuatan yang dinamis antara laki-laki dan perempuan, serta antara kelompok kaya dan miskin. Namun walau demikian PPA bukanlah ditempatkan sebagai pengganti dari survey konvensional dan analisis makro, tetapi lebih sebagai informasi pelengkap yang sangat penting (Narayan, et al., 2002: 16).

2.2. Perkiraan Tingkat Kemiskinan

2.2.1. Perkiraan Tingkat Kemiskinan Absolut

Berbagai penelitian telah dilakukan dalam memperkirakan garis kemiskinan di Indonesia. Penelitian tersebut tidak saja dilakukan oleh instansi pemerintah, seperti BPS, Sajogyo, dan Esmara, dan BKKBN. Dalam penelitian ini akan dibahas pengukuran tingkat kemiskinan absolut menggunakan Garis kemiskinan BPS.

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak 1984 hingga saat ini menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan

ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun bukan makanan yang bersifat mendasar (BPS, 2003: 1).

Jumlah dan persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan tingkat pengeluaran perkapita. Mereka yang memiliki tingkat pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan dikategorikan miskin. Garis kemiskinan, yang merupakan standar kebutuhan dasar tersebut terdiri atas dua komponen, yaitu batas kecukupan makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan ini pada prinsipnya adalah suatu standar minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan perkataan lain, garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran untuk kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan per kapita per bulan.

Batas kecukupan (standar minimum) untuk makanan secara memadai harus dikonsumsi oleh seseorang ditetapkan dengan mengacu kepada rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1978, yaitu setara dengan nilai konsumsi makanan yang menghasilkan energi 2.100 kalori per orang per hari. Nilai rupiah dari pengeluaran makanan tersebut dihitung berdasarkan harga dari suatu paket komoditi makanan yang dikonsumsi oleh penduduk yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Pemilihan paket komoditi makanan ditentukan atas dasar persentase rumah tangga yang mengkonsumsi komoditi tersebut, serta dengan mempertimbangkan volume kalori yang terkandung dan kewajaran sebagai komoditi esensial.

Nilai pengeluaran minimum untuk komoditi bukan makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama dan barang jasa esensial lainnya.

Pemilihan komoditi bukan makanan didasarkan atas hasil Survei Paket Komoditi Dasar (BPS, 1999: 7-8).

Keunggulan penghitungan kemiskinan dengan metode ini adalah penghitungan kemiskinan betul-betul melihat kebutuhan yang esensial bagi masyarakat suatu daerah. Kebutuhan daerah yang satu dan lainnya dengan metode ini dapat berbeda, sehingga penghitungan tingkat kemiskinan menjadi lebih akurat. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah metode penghitungannya cukup rumit karena terlebih dahulu harus menentukan komoditi esensial di masing-masing daerah, sementara komoditi esensial ini dapat berubah setiap saat. Kelemahan lainnya adalah, metode ini sampai sekarang hanya mampu menghitung penduduk miskin secara agregat dan masih belum mampu menunjukkan secara langsung siapa saja yang masuk ke dalam kategori penduduk miskin.

2.2.2. Perkiraan Tingkat Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif berkaitan dengan keadaan kekurangan secara relatif. Kemiskinan relatif tidak membicarakan kebutuhan pokok, namun kemiskinan terjadi bila ada perbandingan. Oleh karena itu, dalam konsep kemiskinan relatif, kemiskinan akan tetap ada selagi belum dicapai pemerataan secara sempurna.

Secara garis besarnya, metode yang digunakan untuk menentukan ukuran kemiskinan relatif dapat dibedakan atas dua kategori, yaitu berdasarkan formula matematika dan bukan berdasarkan formula matematika. Penentuan kemiskinan relatif dengan menggunakan formula matematika membutuhkan perhitungan dengan menggunakan data pendapatan, pengeluaran atau sumber ekonomi yang dimiliki oleh rumah tangga. Sedangkan penentuan garis kemiskinan yang bukan berdasarkan formula matematika ditetapkan berdasarkan keputusan politik atau persetujuan masyarakat, misalnya garis kemiskinan yang didasarkan kepada tingkat upah minimum.

Menurut Taifur (2005: 80-81) hingga saat ini terdapat empat cara yang sering digunakan untuk menentukan dengan menggunakan formula matematika.

Pertama garis kemiskinan relatif diduga berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan atau pengeluaran per kapita. Jika pendapatan atau pengeluaran per kapita adalah sebanyak n dan persentase yang ditetapkan adalah 50 persen, maka garis kemiskinan relatif adalah $0.5 \times n$.

Kedua, garis kemiskinan ditetapkan dengan cara menghitung pengeluaran per kapita rumah tangga. Selanjutnya rumah tangga diurutkan dari rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita paling rendah hingga rumah tangga yang memiliki pengeluaran per kapita paling tinggi. Rumah tangga yang berada dalam kelompok 20% atau 40% terendah dinyatakan sebagai kelompok penduduk miskin.

Ketiga, garis kemiskinan ditetapkan dengan menggunakan rata-rata sumber ekonomi (resources) yang dimiliki oleh rumah tangga disuatu daerah, Rumah tangga yang memiliki sumber ekonomi dibawah rata-rata sumber ekonomi di daerah yang bersangkutan dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

Keempat, dengan menggunakan indeks kesejahteraan rumah tangga yang digunakan dalam mengkaji kemiskinan di Australia. Indeks ini merupakan hasil pembagian antara pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan (household disposable income) dengan garis kemiskinan rumah tangga yang telah ditetapkan dikalikan 100. Jika nilai indeks ini dibawah 100, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

2.3. Penyebab Kemiskinan

2.3.1. Penyebab Umum Terjadinya Kemiskinan

Menurut Kartasmita (1996: 240-241) kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu :

1. *Rendahnya taraf pendidikan.* Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri yang terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan sangat menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan mendapatkan peluang.
2. *Rendahnya derajat kesehatan.* Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya piker dan prakarsa.
3. *Terbatasnya lapangan kerja.* Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
4. *Kondisi keterisolasian.* Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

2.3.2. Sarana dan Prasarana

Kurang tersedianya sarana dan prasarana, seperti sekolah, listrik, pasar dan jalan merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan. Oleh sebab itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat berkaitan dengan keberhasilan upaya penurunan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dilengkapi oleh sarana dan prasarana pendukungnya (Atawolo, dkk, 2001).

Rendahnya taraf pendidikan merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan terbatasnya

kemampuan pengembangan diri dan membatasi kemampuan untuk mencari dan mendapatkan peluang (Kartasmita, 1996: 240-241). Rendahnya taraf pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia mengakibatkan rendahnya produktivitas sehingga akhirnya upahnya juga rendah (Sharp dalam Kuncoro, 1997: 107).

b. Sumber Penerangan Listrik

Krisnamurthi (2003) dalam mengkaitkan kemiskinan dengan ketahanan pangan, menyebutkan sarana dan prasarana sebagai penyebab dan solusi kemiskinan. Kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, dimana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan. Kesejahteraan petani pangan yang relative rendah dan menurun saat ini, salah satu penyebabnya adalah kurang memadainya sarana dan prasarana produksi, termasuk di dalamnya adalah listrik.

Kurang memadai pasokan listrik mengakibatkan berkurangnya akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi, karena listrik dikenal sebagai energi yang siap pakai. Di sisi lain penggunaan peralatan yang menggunakan listrik dapat meningkatkan produktivitas, sehingga kurangnya tenaga listrik tentunya akan menghambat peningkatan produktivitas. Dengan melihat upah sebagai cerminan produktivitas, maka produktivitas yang rendah tentunya akan menghasilkan upah yang rendah pula. Upah yang rendah mengakibatkan lemahnya daya beli dan akhirnya mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengakibatkan lemahnya daya beli dan akhirnya mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengakibatkan munculnya kemiskinan.

Tersedianya tenaga listrik juga sangat mendukung berkembangnya industri rumah tangga. Dengan berkembangnya industri rumah tangga tentunya akan

memunculkan lapangan pekerjaan. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat ditekan serta tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dengan kurangnya pembangunan tenaga listrik, maka perkembangan industri rumah tangga juga akan tersendak, dan penciptaan lapangan kerja juga akan berkurang.

c. Pasar

Mustipadidjaja (1997) menyebutkan di dalam pengentasan kemiskinan diperlukan perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan dalam rangka memperbaiki posisi dan peran ekonomi perdesaan, disamping peningkatan sarana dan prasarana fisik perdesaan di bidang ekonomi dan social. Perhatian pula pada peningkatan akses dalam permodalan, produksi, distribusi dan pasar. Tidak boleh diabaikan dalam hubungan ini adalah pengembangan dan penyampaian informasi pasar, mengenai kecenderungan permintaan pasar yang lebih luas, seperti harga, kualitas, standar dan sebagainya. Sehingga mereka terpacu untuk berproduksi yang sesuai dengan permintaan pasar.

c. Jalan

Didalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan disebutkan bahwa jalan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kurang tersedianya sarana jalan dapat dipandang sebagai salah satu penyebab timbulnya kemiskinan. Karena jalan berfungsi untuk mendorong pemerataan dan menjembatani kesenjangan, maka kurangnya prasarana ini menyebabkan tidak meratanya pembangunan dan menimbulkan kesenjangan, termasuk kesenjangan pendapatan. Akibatnya yang kaya bertambah kaya sedangkan yang miskin semakin miskin.

2.4. Studi Tentang Kemiskinan di Indonesia

a. Strauss dan kawan-kawan

Studi yang dilakukan oleh Strauss et al (2002) menggunakan *Indonesian Family Life Surveys* (IFLS) untuk meneliti dimensi yang lain dari tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia selama krisis. IFLS merupakan survei panel terhadap rumahtangga dan masyarakat di 13 propinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

IFLS merupakan survei panel, sehingga memungkinkan untuk menganalisa perubahan masyarakat, individu, dan rumah tangga tertentu. Dengan data jenis ini seorang peneliti memiliki kesempatan untuk meneliti pengaruh jangka menengah krisis terhadap tingkat dan transisi kemiskinan, kesehatan, dan ukuran kesejahteraan lainnya.

b. Sensus Kemiskinan

Penghitungan kemiskinan dengan mengaplikasikan dan memodifikasi pendekatan kriteria penduduk miskin BPS telah dilaksanakan di tiga propinsi, yaitu Kalimantan Selatan (1999), DKI Jakarta (2000), dan Jawa Timur (2001). Aplikasi penghitungan kemiskinan berdasarkan variabel-variabel kemiskinan rumah tangga tersebut dikenal sebagai Sensus Kemiskinan antara lain:

1. Kelompok pendapatan perkapita.
2. Pola makanan.
3. Pakaian.
4. Perumahan : luas lantai, jenis lantai, jenis atap, dan kakus.
5. Fasilitas TV.
6. Luas lantai hunian kurang dari 8 m² per anggota rumahtangga.

7. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah atau lainnya.
8. Fasilitas air bersih : tidak ada.
9. Fasilitas jamban/WC : tidak ada dan atau WC Umum.
10. Kepemilikan aset (kursi tamu) : tidak tersedia.
11. Konsumsi lauk-pauk dalam seminggu : tak bervariasi.
12. Kemampuan membeli pakaian minimal 1 stel dalam setahun untuk setiap anggota rumahtangga : tidak ada.

c. **Peta Penduduk Miskin Indonesia, 2000**

Pemetaan penduduk miskin memberikan gambaran awal yang menyeluruh (*snapshot*) mengenai sebaran penduduk miskin berdasarkan tingkat wilayah administrasi tertentu dan pada waktu tertentu. Peta semacam ini adalah untuk mengetahui peta wilayah atau “kantong” penduduk miskin di Indonesia. Melalui peta ini penduduk miskin dapat diketahui, baik secara relatif (persentase penduduk miskin) maupun secara absolut (jumlah penduduk miskin).

Metode pemetaan penduduk miskin (Metode *PovMap*) pada dasarnya merupakan suatu metode yang menggunakan model regresi untuk memperkirakan pengeluaran rumahtangga dalam sensus berdasarkan data pengeluaran hasil survei. Hasil estimasi mengenai ukuran-ukuran kesejahteraan rumahtangga hasil sensus kemudian diaggregasikan menjadi ukuran-ukuran kemiskinan dan ketimpangan pada tingkat desa.

Metode *PovMap* diimplementasikan melalui dua tahap. Tahap pertama merupakan tahap pembentukan model pengeluaran dan dekomposisi komponen *residu* (random). Dalam tahap ini penghitungan *poverty mapping* dimulai dengan melakukan estimasi fungsi pengeluaran. Dalam pemilihannya, variabel-variabel penjelas yang akan digunakan dalam model pengeluaran harus terdapat pada data sensus dan survei, variabel-variabel tersebut kemudian diuji dan didiagnostik melalui metode statistik

untuk memperoleh variabel penjelas yang paling tepat menjelaskan fungsi konsumsi rumahtangga. Tahap kedua adalah tahap simulasi. Pada tahap ini proses simulasi melakukan beberapa tahap iterasi untuk memperoleh model yang paling tepat untuk menjelaskan konsumsi rumahtangga sensus. Proses ini menggunakan paket program (*software package*) yang telah disiapkan oleh Qinghua Zhao dari DECRG *World Bank* (2002). Aplikasi *software* tersebut secara otomatis (dengan spesifikasi model yang memadai) menghasilkan indeks-indeks kemiskinan sampai pada level desa dengan masing-masing tingkat kecermatan kesalahan bakunya.

d. Pemetaan Kemiskinan Kecamatan di Indonesia, 2005

Penghitungan penduduk miskin tahun 2005 tingkat kecamatan dilakukan dengan menggunakan gabungan data Susenas Kor tahun 2000-2005, sehingga kecukupan sampel untuk estimasi pada tingkat kecamatan terpenuhi. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode yang didasarkan pada Hukum Engel. Dasar dari Hukum Engel adalah semakin miskin seseorang maka akan semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan.

e. Pendekatan Spesifik-Daerah dan Sayang Budaya di Sumba Timur

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang secara sentralistik kurang memadai dan kurang realistis dalam memantau kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pada level atau di bawah level kabupaten/kota. Budaya lokal dan faktor-faktor non-ekonomi lainnya hanya dipertimbangkan secara tidak langsung melalui penyeragaman pola konsumsi tingkat propinsi. Informasi-informasi yang dihasilkan tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena tidak dapat mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya yang terjadi. Oleh karena itu, alat pengukuran yang akurat, yang dapat merefleksikan hubungan sosial dan budaya dan yang menyebabkan kemiskinan pada

level atau di bawah level kabupaten/kota di Indonesia sangat diperlukan (Menuju Pendekatan Pemantauan Kesejahteraan Rakyat yang Spesifik Daerah dan Sayang Budaya, Ritonga dan Betke 2002).

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis, yang dapat “diterjemahkan” ke dalam berbagai kebijakan yang perlu diambil dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah. Tinjauan terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri perlu dilakukan. Indikator-indikator tersebut tentunya harus bersifat spesifik lokal dan sayang budaya. Salah satu model kesejahteraan yang komprehensif dan mampu mengidentifikasi tingkat kesejahteraan individu, rumahtangga atau keluarga, unit-unit sosial, dan wilayah komunitas adalah “Model Ketahanan Sosial” seperti dikembangkan Betke (2002).

2.5. Pengukuran Outcome Targeting

Dalam program yang menggunakan target intervensi, kesuksesan dan kegagalan dari program terhadap tujuannya sangat ditentukan oleh tingkat akurasi sasaran. Satu contoh mengukur outcome targeting dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel ini menunjukkan bahwa program yang memberikan manfaat pada penerima program akan mendapatkan dua kemungkinan outcome yang sukses dan dua kemungkinan outcome yang gagal. Outcome yang sukses adalah jika penerima program benar-benar orang miskin dan yang tidak menerima program benar-benar tidak miskin. Sebaliknya, dikatakan outcome yang

gagal jika penerima program ternyata tidak miskin (*inclusion error* atau *leakage*) atau jika ada orang miskin yang seharusnya menerima manfaat program tetapi tidak menerima (*exclusion error* atau *undercoverage*).

Dari Tabel dapat dihitung beberapa angka, yaitu tingkat kesuksesan program (*success rate*) sebesar $(10+50)/100 = 60$ persen, dan tingkat kegagalan (*error rate*) sebesar $(10+30)/100 = 40$ persen. Angka-angka dalam Tabel di atas juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung angka yang sering dipakai dalam pengukuran *targeting* yaitu *undercoverage* dan *leakage*. *Undercoverage* adalah jumlah orang atau rumah tangga yang semestinya mendapatkan bantuan (yaitu orang atau rumah tangga miskin) namun tidak tercakup dalam program, sementara *leakage* adalah rumah tangga yang menerima manfaat bantuan program namun sebenarnya bukan rumah tangga miskin. Dari Tabel, persentase *undercoverage* adalah sebesar 50 persen ($10/20$) dan persentase *leakage* adalah sebesar 75 persen ($30/40$).

Tabel 2:1
Outcome dari Targeting

		Status Kemiskinan		Jumlah
		Miskin	Tidak Miskin	
Kategori Rumah Tangga	Penerima BLT	Sukses (10)	Inclusion Error /Leakage (30)	40
	Bukan Penerima BLT	Exclusion Error/Under Coverage (10)	Sukses (50)	60
Jumlah		20	80	100

Sumber: Sudarno Sumarto, 2001

2.6. Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE05)

Data kemiskinan yang selama ini dihitung dari Susenas merupakan data makro berupa perkiraan penduduk miskin di Indonesia yang hanya dapat disajikan sampai

tingkat propinsi/kabupaten. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan mikro berupa direktori rumahtangga menerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang berisi nama kepala rumahtangga dan alamat tempat tinggal mereka. Berbeda dengan data kemiskinan makro, penentuan rumahtangga penerima BLT pada PSE05 didasarkan pada pendekatan karakteristik rumahtangga, bukan dengan pendekatan nilai konsumsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum (*non-monetary approach*).

Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu :

1. Luas lantai rumah
2. Jenis lantai rumah
3. Jenis dinding rumah
4. Fasilitas tempat buang air besar
5. Sumber air minum
6. Penerangan yang digunakan
7. Bahan bakar yang digunakan
8. Frekuensi makan dalam sehari
9. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
10. Kemampuan membeli pakaian.
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Lapangan pekerjaan kepala rumahtangga
13. Pendidikan kepala rumahtangga
14. Kepemilikan aset.

Metode yang digunakan dalam penentuan kategori rumahtangga penerima BLT adalah dengan menggunakan sistem skoring dimana setiap variabel diberi skor yang diberi bobot dan bobotnya didasarkan kepada besarnya pengaruh dari setiap variabel terhadap kemiskinan. Jumlah variabel dan besarnya bobot berbeda di setiap kabupaten.

Dari bobot masing-masing variabel terpilih untuk tiap kabupaten/kota selanjutnya dihitung indeks skor rumahtangga penerima BLT dari hasil PSE05 dengan formula:

$$I_{RM} = \sum W_i X_i$$

dimana:

- W_i = bobot variabel terpilih, dan $\sum W_i = 1$
- X_i = nilai skor variabel terpilih (skor 1 untuk jawaban yang mengindikasikan miskin dan skor 0 untuk jawaban yang mengindikasikan tidak miskin).
- I_{RM} = indeks rumahtangga penerima BLT, dengan nilai antara 0 dan 1.

Berdasarkan nilai I_{RM} diatas, selanjutnya semua rumahtangga diurutkan dari nilai I_{RM} terbesar sampai terkecil. Semakin tinggi nilai I_{RM} maka semakin miskin rumahtangga tersebut.

2.7. Proxy Means Test

Menurut kamus kata "*proxy*" berarti "*may refer to something which acts on behalf of something else, as in*" atau jika proxy dikaitkan dengan ilmu statistika (*proxy statistic*) berarti "*a measured variable used to infer the value of a variable of interest*". Jadi secara mudah, Proxy Means Test (PMT) berarti pengujian rata-rata dari suatu variabel yang digunakan untuk menyimpulkan nilai dari suatu variabel yang menjadi perhatian.

Secara lebih gamblang, penjelasan PMT adalah sebagai berikut. Jika indikator kemiskinan menggunakan suatu angka yaitu garis kemiskinan sebagai dasar penentuan seseorang miskin atau tidak, maka perlu dicari satu angka sebagai pembandingnya. Dalam hal ini, angka pengeluaran per kapita sebulan (APPKS) merupakan variabel interest kita. Variabel APPKS merupakan angka yang dihitung dari pengeluaran makanan dan non makanan dalam rumah tangga. Ini berarti tinggi rendahnya APPKS

dipengaruhi oleh banyak hal seperti pengeluaran makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, pembelian barang tahan lama, dan lain sebagainya.

Grosh dan Baker (1995) menyatakan istilah PMT digunakan untuk mendeskripsikan suatu situasi dimana informasi tentang rumahtangga atau karakteristik individu yang berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan digunakan dalam suatu algoritma untuk memproksi pendapatan rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga atau kebutuhan rumah tangga. Jadi PMT sesungguhnya adalah suatu cara menghitung tingkat kesejahteraan menggunakan variabel yang mudah untuk dievaluasi.

Kebutuhan akan PMT adalah karena *"targeting benefits to the poor, however simple in concept, is an inexact art in practice"* (Grosh dan Baker (1995)). Targeting yang kuat membutuhkan definisi tentang kelompok sasaran yang tepat yang pada gilirannya membutuhkan suatu konsensus politis yang sulit untuk dikonsolidasikan. Untuk menghindari hal ini, sekelompok variabel yang sangat mudah dievaluasi harus ditentukan agar penentuan kelompok sasaran tidak dipermasalahkan.

Contoh penggunaan PMT di Indonesia adalah ketika pemerintah akan menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT) yang penjelasannya dapat dilihat pada sub bab 2.8.

2.8. Penggunaan PMT di Beberapa Negara

PMT telah digunakan di banyak negara oleh beberapa peneliti dalam rangka membuat skema bantuan yang tepat bagi rumah tangga miskin. Tercatat tidak kurang 8 negara seperti India, Bangladesh, Sri Lanka, Ghana, Pilipina, Meksiko, Brasil, dan Indonesia pernah menggunakan untuk analisis PMT. Penggunaan PMT pada umumnya diarahkan kepada pengembangan skema transfer baik uang mau pun makanan kepada rumah tangga miskin.

Ravallion dan Chao (1989) misalnya, melakukan PMT untuk mengembangkan suatu skema tranfer dengan hanya menggunakan dua atau tiga variabel saja. Algoritma yang mereka gunakan membuat penggunaan dari informasi menjadi optimal dengan cara meminimumkan biaya pengumpulan data. Usulan skema targetingnya memungkinkan untuk diberikan kepada semua individu dalam suatu kelompok dengan besaran uang yang sama dan dapat juga diberikan berbeda untuk kelompok karakteristik yang lain.

Tiga penelitian lainnya, yaitu Datt dan Ravallion (1993) menggunakan targeting per wilayah di India, Ravallion (1993) menggunakan targeting per wilayah di Indonesia, dan Ravallion (1989) menggunakan kelas kepemilikan lahan di Bangladesh mengaplikasikan algoritma yang sama untuk menghitung dampak terhadap kemiskinan. Mereka menunjukkan bahwa satu indikator pada tingkat makro dapat digunakan khususnya jika ada kendala terkait dengan tranfer atau anggaran.

Haddad, Sullivan dan Kennedy (1991) menggunakan data survei rumah tangga dari Ghana, Philipina, Meksiko, dan Brazil untuk menunjukkan suatu permasalahan yang secara konseptual identik dengan PMT. Mereka tertarik dalam mengumpulkan variabel lain yang lebih mudah untuk diukur serta dapat juga dengan mudah memprediksi keamanan pangan dan gizi. Mereka menggunakan sample overlaps untuk mengukur tingkat akurasi. Sebagai contoh, mereka menunjukkan bahwa di pedesaan Brazil 55% dari rumah tangga yang mempunyai banyak jumlah anggota rumah tangga mempunyai tingkat keamanan pangan yang paling rendah.

Glewwe dan Kaanan (1989) menunjukkan bagaimana karateristik rumah tangga dapat digunakan untuk melakukan PMT. Mereka menggunakan analisis regresi untuk

memprediksi tingkat kesejahteraan berdasarkan kombinasi beberapa variabel yang mudah untuk diukur. Mereka kemudian menetapkan untuk setiap individu suatu transfer yang sama. Mereka memulai dengan mempertimbangkan distribusi tingkat kesejahteraan hingga anggaran yang ditetapkan. Disamping itu metode pengukuran kemiskinan FGT digunakan pula untuk membandingkan hasil dari skema target dengan melihat perbandingan antara yang mendapat dan tidak mendapat.

Dengan mempertahankan anggaran konstan mereka menghitung bagaimana mendapatkan lebih banyak informasi pada penerima manfaat sehingga membuat targetting lebih akurat dan dapat menurunkan kemiskinan lebih banyak lagi dengan beban anggaran tertentu.

Glewve (1990) melakukan pendekatan yang sama dengan menggunakan regresi untuk memprediksi tingkat kesejahteraan, namun ia menyelesaikan satu problema minimisasi kemiskinan untuk menentukan penimbang bagi setiap variabel rumah tangga. Meskipun secara teoritis lebih akurat, teknik ini lebih sulit untuk dihitung dan hasilnya pun tidak begitu berbeda dari analisa regresi pada penelitian sebelumnya .

2.9. Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Umum PKH adalah mendapatkan data rumah tangga sangat miskin (RTSM) calon penerima bantuan tunai bersyarat serta data fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar. Tujuan khusus PKH adalah (a) menyediakan keterangan demografi, pendidikan dan kesehatan setiap Anggota Rumah Tangga (ART) serta keterangan perumahan RTSM yang memenuhi kriteria PKH, (b) menyediakan keterangan tentang keberadaan pelayanan dasar kesehatan bagi anak dan ibu hamil, seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Polindes, Klinik Desa, Bidan Desa, Mantri Kesehatan,

Posyandu, bagi anak dan ibu hamil pada RTSM di wilayah tempat tinggal RTSM, dan (c) menyediakan keterangan tentang keberadaan pelayanan dasar pendidikan SD dan SLTP sederajat, bagi anak usia sekolah 5-17 tahun.

Program Keluarga Harapan juga merupakan program baru yang dimulai pada tahun 2007. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan cara pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut, yaitu: 1) ada balita (bayi usia dibawah 5 tahun), 2) ada anak usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama (usia antara 5-17 tahun), dan 3) ada wanita hamil usia 10-49 tahun.

Untuk jangka pendek, bantuan tunai bersyarat yang diberikan melalui PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM yang memenuhi kriteria PKH. Namun demikian, RTSM yang menerima bantuan tunai tersebut dipersyaratkan untuk secara rutin memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan, dan menyekolahkan anak usia 5-17 tahun ke sekolah dasar (SD) atau ke sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di wilayah kecamatan tempat tinggal RTSM tersebut.

Dalam jangka panjang, PKH mempunyai tujuan sangat mulia, yaitu pembangunan kapabilitas dasar manusia sehingga terjadi pemotongan pewarisan kemiskinan antar generasi. Dalam kerangka tersebut program ini juga dirancang untuk mempercepat pencapaian penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan mengurangi kasus pekerja anak dan mempercepat pencapaian Millennium Development Goals (MDGs).

Secara umum data yang dikumpulkan dikategorikan dalam PKH adalah meliputi:

(1). Jumlah dan karakteristik fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar,

(2). Jumlah dan karakteristik rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebagai penerima manfaat PKH.

Untuk data fasilitas pelayanan, rincian jenis data yang dikumpulkan dapat dilihat pada kuesioner SPDKP.DESA. Kuesioner tersebut antara lain berisi:

- kapasitas pelayanan,
- jumlah pemanfaat pelayanan (*clients*),
- jumlah pelaksana/petugas pelayanan,
- perlengkapan minimal untuk dapat memberikan pelayanan.

Lebih rinci karakteristik rumah tangga sangat miskin, baik anggota rumah tangga maupun rumah tangga yang dikumpulkan Daftar SPDKP07.RT, antara lain:

- keterangan demografis anggota rumah tangga,
- keterangan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kecacatan.
- nama dan alamat tempat ART memperoleh pelayanan (sekolah dan perawatan kesehatan)
- keterangan pekerja anak
- keterangan perumahan

Selama tahun 2007-2015 total jumlah penerima bantuan tunai bersyarat melalui PKH berkisar 6,5 juta RTSM, dengan jumlah RTSM dan pemilihan daerah dilakukan secara bertahap. Untuk menentukan calon penerima bantuan tunai bersyarat melalui PKH, BPS melakukan Proxy Means Test untuk menentukan rumah tangga sangat miskin dan kemudian melakukan verifikasi dengan melakukan Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) yang dilakukan secara bertahap selama 3 tahun.

Untuk tahap pertama tahun 2007, BPS melakukan pendataan SPDKP dalam dua putaran. Pendataan SPDKP 2007 putaran pertama telah dilakukan pada bulan April-Juli 2007 untuk mendapatkan 500.000 RTSM calon penerima PKH tahun 2007 di 348 kecamatan terpilih, yang tersebar di 49 kabupaten dan 7 provinsi. Disamping

melakukan pendataan calon penerima bantuan tunai bersyarat melalui PKH, pada waktu yang sama BPS juga melakukan pendataan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar setingkat SD dan SLTP di 348 kecamatan terpilih tersebut. Pendataan SPDKP 2007 putaran kedua akan dilakukan pada bulan Agustus-Nopember 2007 untuk mendapatkan 700.000 RTSM calon penerima bantuan PKH tahun 2008 di 615 kecamatan terpilih yang tersebar di 97 kabupaten/kota dan 15 provinsi.

Program Keluarga Harapan (PKH) akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia secara bertahap. Pada tahap pertama tahun 2007, sebanyak 348 kecamatan ditetapkan sebagai wilayah uji coba PKH yang tersebar di 49 kabupaten/kota di 7 provinsi. Penentuan kecamatan sebagai wilayah ujicoba didasarkan atas usulan pemerintah kabupaten/kota dan kajian independen atas kesiapan memberikan pelayanan di kecamatan tersebut. Dengan cara demikian tidak semua kecamatan di suatu kabupaten/kota terpilih, namun demikian semua desa/kelurahan di kecamatan terpilih dicakup PKH. Penentuan rumah tangga miskin terpilih didasarkan pada *Proxy Means Test*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah 4 (empat) dari 7 (tujuh) propinsi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Pemilihan empat propinsi ini didasarkan pada karakteristik rumah tangga miskin di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta DKI Jakarta sebagai pembanding. Data yang digunakan adalah Data Susenas Kor 2006, Potensi Desa (PODES) 2005, dan data penerima BLT 2005 serta Garis Kemiskinan 2006.

Penelitian ini dibatasi pada hubungan antara pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan dengan karakteristik rumah tangga yang dianggap berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan.

3.2. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menggunakan kerangka analisis yang diperlihatkan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. Penjelasan tentang metodologi untuk kedua Gambar ini adalah sebagai berikut:

3.2.1. Penentuan Rumah Tangga Miskin Untuk Model PMT

Asumsi dalam penelitian ini adalah bahwa semua rumah tangga penerima BLT terkategori rumah tangga miskin (RTM), sehingga data rumah tangga Susenas Kor 2006 yang akan dipakai dalam analisis regresi harus dipilah menurut rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Untuk menentukan apakah rumah tangga Susenas Kor 2006 terkategori miskin atau tidak miskin maka digunakan Garis Kemiskinan 2006. Rumah tangga Susenas Kor 2006 dikatakan miskin jika pengeluaran rumah tangga per kapita sebulannya di bawah

Garis Kemiskinan 2006 dan rumah tangga Susenas Kor 2006 dikatakan tidak miskin jika pengeluaran rumah tangga per kapita sebulannya di atas atau sama dengan Garis Kemiskinan 2006.

Dalam mengkategorikan rumah tangga miskin atau tidak, BPS mengklasifikasikan membedakannya berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan. Sebagai contoh di DKI Jakarta, suatu rumah tangga di perkotaan pada tahun 2006 dikatakan miskin jika rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan lebih kecil dari Rp. 295.267,-, sedangkan rumah tangga dikatakan tidak miskin jika rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan lebih besar atau sama dengan dari Rp. 295.267,-. Tabel 3.1 adalah Garis Kemiskinan 2006 yang dipakai untuk memilah rumah tangga Susenas Kor 2006 menjadi miskin dan tidak miskin.

Tabel 3.1.:
Garis Kemiskinan 2006 Menurut Daerah di Empat Propinsi
(Dalam Rupiah)

No (1)	Provinsi (2)	Kota (3)	Desa (4)	K+D (5)
1	DKI Jakarta	295.267	-	295.267
2	Nusa Tenggara Timur	156.696	103.903	137.147
3	Sulawesi Utara	205.685	177.246	184.597
4	Gorontalo	165.585	142.331	145.578

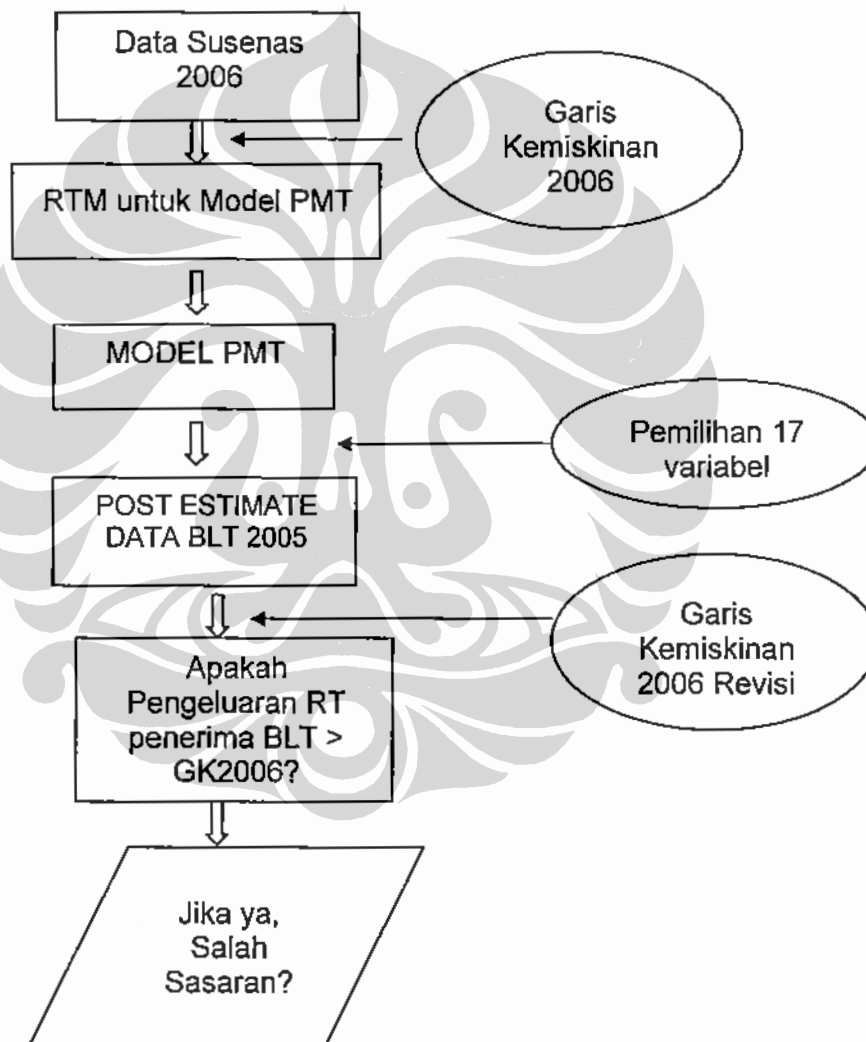
Sumber: BPS, 2006

3.2.2. Merging Data RTM Susenas Kor 2006 dengan PODES 2005

Seperti disebutkan sebelumnya untuk mengetahui dampak variabel infrastruktur digunakan juga data PODES 2005, sehingga setelah ditentukan sejumlah rumah tangga miskin (RTM) dari data Susenas Kor 2006 selanjutnya dilakukan *merging* data RTM dengan data PODES 2005. *Merging* data Susenas Kor 2006 dan PODES 2005

dilakukan dengan menyamakan terlebih dahulu identitas kode propinsi, kode kabupaten/kotamadya, kode kecamatan, serta kode desa/kelurahan data Susenas 2006 dengan identitas kode propinsi, kode kabupaten/kotamadya, kode kecamatan, serta kode desa/kelurahan data PODES 2005. Hal ini dapat dilakukan karena baik PODES 2005 maupun Susenas Kor 2006 menggunakan kode-kode identitas yang berasal dari Master File Desa (MFD) yang baku dari Badan Pusat Statistik.

Gambar 3.1:
Kerangka Analisis Untuk Menjawab Tujuan Pertama dan Kedua



Berdasarkan hasil *merging* data RTM Susenas Kor 2006 dengan PODES 2005 dihasilkan masing-masing RTM seperti Tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2.
Jumlah Rumah Tangga Susenas 2006 dan Rumah Tangga Miskin Untuk Model PMT

Propinsi	Rumah Tangga Susenas Kor 2006			Rumah Tangga Miskin		
	Kota	Desa	Tangga	Kota	Desa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	6.832	0	6.832	732	0	732
Nusa Tenggara Timur	1.456	8.265	9.721	225	1.789	2.014
Sulawesi Utara	1.920	3.738	5.658	208	1.007	1.215
Gorontalo	800	2.556	3.356	107	868	975
Jumlah	11.008	14.559	25.567	1.272	3.664	4.936

Sumber: BPS, data diolah

Keterangan:

Kolom (2) s/d (4) adalah data Susenas Kor 2006 yang telah dimerging dengan data PODES

Kolom (5) s/d (7) adalah data rumah tangga miskin Susenas Kor 2006 yang dipakai dalam Model PMT

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa data Susenas Kor 2006 yang merupakan rumah tangga miskin (RTM) yang akan diolah untuk Model PMT adalah sebanyak 732 rumah tangga di DKI Jakarta, 2.014 rumah tangga di Nusa Tenggara Timur, 1.215 rumah tangga di Sulawesi Utara, dan 975 rumah tangga di Gorontalo.

3.2.3. Spesifikasi Model Untuk Tujuan 1 dan 2

Setelah ditentukan jumlah RTM dari Susenas Kor 2006 - yang telah di *merging* data PODES dalam data RTM tersebut - selanjutnya disusun dua model PMT.

SPESIKASI MODEL 1

Model 1 adalah model ini ingin melihat pengaruh variabel-variabel yang dipakai dalam menghitung skoring rumah tangga penerima BLT yang dilaksanakan BPS pada

tahun 2005 terhadap pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan. Model ini menggunakan 8 variabel BLT dengan representasi matematis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \varepsilon \quad (3.1)$$

dimana

- B_0 = Intercept
- B_i = Koefisien regresi ($i=1,2,\dots,8$)
- Y = Pengeluaran Per Kapita sebulan
- X_1 = Luas Lantai Perkapita
- X_2 = Jenis Lantai
- X_3 = Jenis Dinding
- X_4 = Fasilitas Buang Air Besar
- X_5 = Sumber Air Minum
- X_6 = Jenis Penerangan
- X_7 = Lapangan Usaha KRT Pertanian
- X_8 = Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Agar klasifikasi/kategori variabel pada Model 1 ini sama dengan model yang digunakan dalam skoring RTM penerima BLT maka dilakukan pengkategorian data untuk variabel-variabel Susenas Kor 2006 yang bersifat kualitatif. Kategori didasarkan pada klasifikasi rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Untuk keseragaman dengan klasifikasi yang digunakan dalam BLT 2005, maka hanya ada 2 kategori dalam variabel kualitatif yaitu kode 1 menunjukkan rumah tangga tidak miskin, sedangkan kode 0 untuk menunjukkan rumah tangga miskin. Klasifikasi Variabel Susenas Kor 2006 untuk Model 1 adalah seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Klasifikasi Variabel Susenas Kor 2006 Untuk Model 1

No	Nama Variabel	Keterangan	RT Tidak Miskin	RT Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	pcfloor	Luas Lantai Per Kapita	Kontinyu	
2	tfloor	Jenis Lantai	1= Bukan tanah	0 = tanah
3	twall	Jenis Dinding	1= Batu bata/semen	0 = lainnya
4	toilet	Fasilitas Buang Air Besar	1= Milik sendiri	0 = lainnya
5	water	Sumber Air Minum	1= Air bersih	0 = tidak

Tabel 3.3.
Klasifikasi Variabel Susenas Kor 2006 Untuk Model 1

No	Nama Variabel	Keterangan	RT Tidak Miskin	RT Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	lighting	Jenis Penerangan	1= PLN	0 = bukan
7	hhsector1	Lapangan Usaha KRT	1= Pertanian	0 = lainnya
8	hheduc	Pendidikan KRT	1= SLTP ke atas	0 = lainnya

Sumber: BPS, data diolah

SPESIKASI MODEL 2

Model 2 ini ingin melihat pengaruh semua variabel-variabel yang dikumpulkan dalam PSE 2005 terhadap pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan. Model ini menggunakan 17 variabel dengan representasi matematis sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \dots + \beta_{17} X_{17} + \varepsilon \quad (3.2)$$

dimana

- B_0 = Intercept
- B_i = Koefisien regresi ($i=1,2,\dots,17$)
- X_1 = Luas Lantai Perkapita
- X_2 = Jenis Lantai
- X_3 = Jenis Dinding
- X_4 = Fasilitas Buang Air Besar
- X_5 = Sumber Air Minum
- X_6 = Jenis Penerangan
- X_7 = Lapangan Usaha KRT di Pertanian
- X_8 = Lapangan Usaha KRT di Industri
- X_9 = Lapangan Usaha KRT di Jasa
- X_{10} = Pendidikan KRT
- X_{11} = Jumlah Anggota Rumah Tangga
- X_{12} = Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun
- X_{13} = Jumlah Anak Yang Sekolah di SD
- X_{14} = Jumlah Anak Yang Sekolah di SMP
- X_{15} = Jumlah Anak Yang Sekolah di SMA
- X_{16} = Jumlah Wanita 10-49 tahun
- X_{17} = Apakah rumah tangga mendapatkan kredit

Seperti halnya dengan Model 1 maka hanya ada 2 kategori dalam variabel kualitatif yaitu kode 1 menunjukkan rumah tangga tidak miskin, sedangkan kode 0

untuk menunjukkan rumah tangga miskin. Klasifikasi Variabel Susenas Kor 2006 untuk Model 2 adalah seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Klasifikasi Variabel Susenas Kor 2006 Untuk Model 2

No	Nama Variabel	Keterangan	RT Tidak Miskin	RT Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	pcfloor	Luas Lantai Per Kapita	Kontinyu	
2	tffloor	Jenis Lantai	1= Bukan tanah	0 = tanah
3	twall	Jenis Dinding	1= Batu bata/semén	0 = lainnya
4	toilet	Fasilitas Buang Air Besar	1= Milik sendiri	0 = lainnya
5	water	Sumber Air Minum	1= Air bersih	0 = tidak
6	lighting	Jenis Penerangan	1= PLN	0 = bukan
7	hhsector1	Lapangan Usaha KRT	1= Pertanian	0 = lainnya
8	hhsector2	Lapangan Usaha KRT	1= Industri	0 = lainnya
9	hhsector3	Lapangan Usaha KRT	1= Jasa	0 = lainnya
10	hheduc	Pendidikan KRT	1= SLTP ke atas	0 = lainnya
11	hhsizé	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Diskrit	
12	age04	Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun	Diskrit	
13	eschild	Jumlah Anak Yang Sekolah di SD	Diskrit	
14	jschild	Jumlah Anak Yang Sekolah di SMP	Diskrit	
15	sschild	Jumlah Anak Yang Sekolah di SMA	Diskrit	
16	wmn1049	Jumlah Wanita 10-49 tahun	Diskrit	
17	credit	Apakah RT mendapatkan kredit?	1= Ya, mendapat	0 = Tidak

Sumber: BPS, data diolah

Perlu dicatat disini bahwa variabel nomor 11 hingga nomor 18 adalah variabel yang dikumpulkan dalam BLT 2005, namun tidak dipakai dalam skoring BLT. Dalam penelitian ini, kedelapan variabel ini digunakan agar dapat menangkap rumah tangga sangat miskin yang akan diambil untuk program PKH 2007.

3.2.4. Spesifikasi Model Untuk Tujuan 3

Model 3 disusun menggunakan kerangka analisis seperti pada Gambar 3.2. Perbedaan utama Model 3 ini dengan dua model sebelumnya adalah model ini

memasukkan variabel PODES 2005 untuk melihat pengaruhnya terhadap pengeluaran rumah tangga.

SPEKIFIKASI MODEL 3

Model 3 ini ingin melihat pengaruh semua variabel-variabel yang dikumpulkan dalam PSE 2005 serta efek lokasi terhadap pengeluaran rumah tangga miskin. Penambahan variabel PODES dalam model ini dimaksudkan untuk melihat apakah pengeluaran rumah tangga yang akan menerima bantuan dari PKH juga dipengaruhi oleh variabel-variabel infrastruktur. Model ini menggunakan 25 variabel dengan representasi matematis sebagai berikut :

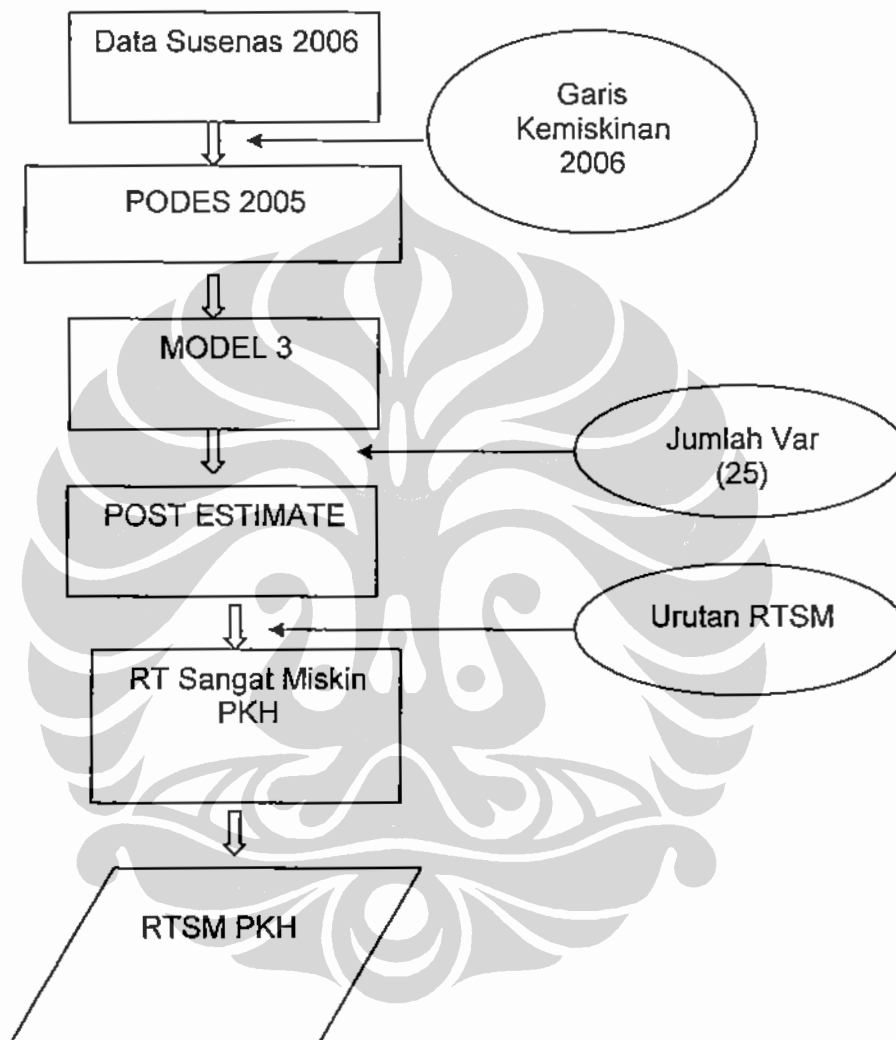
$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \dots + \beta_{25} X_{25} + \epsilon \quad (3.3)$$

dimana:

- B_0 = Intercept
- B_i = Koefisien regresi ($i=1,2,\dots,25$)
- Y = Pengeluaran Per Kapita sebulan
- X_1 = Luas Lantai Perkapita
- X_2 = Jenis Lantai
- X_3 = Jenis Dinding
- X_4 = Fasilitas Buang Air Besar
- X_5 = Sumber Air Minum
- X_6 = Jenis Penerangan
- X_7 = Lapangan Usaha KRT di Pertanian
- X_8 = Lapangan Usaha KRT di Industri
- X_9 = Lapangan Usaha KRT di Jasa
- X_{10} = Jumlah art yang masih sekolah
- X_{11} = Pendidikan KRT
- X_{12} = Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun
- X_{13} = Jumlah Anak Yang Sekolah di SD
- X_{14} = Jumlah Anak Yang Sekolah di SMP
- X_{15} = Jumlah Anak Yang Sekolah di SMA
- X_{16} = Jumlah Wanita 10-49 tahun
- X_{17} = Apakah rumah tangga mendapatkan kredit
- X_{18} = Kepadatan Penduduk
- X_{19} = Jarak ke Kab/Kota terdekat
- X_{20} = Ketersediaan Gedung/Sekolah SD
- X_{21} = Ketersediaan Gedung/Sekolah SMP

- X22 = Ketersediaan Polindes
- X23 = Ketersediaan Bidan
- X24 = Jenis Permukaan Jalan
- X25 = Ketersediaan Pasar Semi Permanen

Gambar 3.2:
Kerangka Analisis Untuk Menjawab Tujuan Ketiga



Seperti halnya dengan Model 1 dan 2 maka hanya ada 2 kategori dalam variabel kualitatif yaitu kode 1 menunjukkan rumah tangga tidak miskin, sedangkan kode 0 untuk menunjukkan rumah tangga miskin. Klasifikasi Variabel untuk Model 3 adalah seperti pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Klasifikasi Variabel Susenas Kor 2006 Untuk Model 3

No	Nama Variabel	Keterangan	RT Tidak Miskin	RT Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	pcfloor	Luas Lantai Per Kapita	Kontinyu	
2	tfloor	Jenis Lantai	1= Bukan tanah	0 = tanah
3	twall	Jenis Dinding	1= Batu bata/semen	0 = lainnya
4	toilet	Fasilitas Buang Air Besar	1= Milik sendiri	0 = lainnya
5	water	Sumber Air Minum	1= Air bersih	0 = tidak
6	lighting	Jenis Penerangan	1= PLN	0 = bukan
7	hhsector1	Lapangan Usaha KRT	1= Pertanian	0 = lainnya
8	hhsector2	Lapangan Usaha KRT	1= Industri	0 = lainnya
9	hhsector3	Lapangan Usaha KRT	1= Jasa	0 = lainnya
10	hheduc	Pendidikan KRT	1= SLTP ke atas	0 = lainnya
11	hhsiz	Jumlah Anggota Rumah Tangga	Diskrit	
12	age04	Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun	Diskrit	
13	eschild	Jumlah Anak Yang Sekolah di SD	Diskrit	
14	jschild	Jumlah Anak Yang Sekolah di SMP	Diskrit	
15	sschild	Jumlah Anak Yang Sekolah di SMA	Diskrit	
16	wmn1049	Jumlah Wanita 10-49 tahun	Diskrit	
17	credit	Apakah RT mendapatkan kredit?	1= Ya, mendapat	0 = Tidak
18	villpdens	Kepadatan Penduduk	Kontinyu	
19	vill2dist	Jarak ke Kab/Kota terdekat	Kontinyu	
20	villsd	Ketersediaan Gedung/Sekolah SD	1 = Ada SD	0 = tidak ada
21	villsm	Ketersediaan Gedung/Sekolah SMP	1 = Ada SMP	0 = tidak ada
22	villpolin	Ketersediaan Polindes	1 = Ada Polindes	0 = tidak ada
23	villbidan	Ketersediaan Bidan	1 = Ada Bidan	0 = tidak ada
24	villrtye	Jenis Permukaan Jalan	1 = Jalan Aspal	0 = bukan aspal
25	villpmlace	Ketersediaan Pasar Semi Permanen	1 = Ada pasar	0 = tidak ada

Sumber: BPS, data diolah

Perlu diketahui bahwa Model 3 ini mempunyai manfaat untuk menangkap dampak pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Jika ternyata, variabel-variabel PODES 2005 ini nyata mempengaruhi pengeluaran rumah tangga maka berarti ada dampak pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Dalam penelitian ini, pengaruh variabel PODES diasumsikan dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga.

3.3. Metode Estimasi

Model Regresi berganda diterapkan dalam model dengan Metode Estimasi OLS. Prosedur menghitung Regresi dengan OLS dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.3.1. Metode Estimasi OLS

Metode estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) adalah metode estimasi terbaik yang menjamin estimator yang *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimator*). Estimasi OLS dipakai untuk mendapatkan penyimpangan/kesalahan atau *error* terkecil. Beberapa asumsi model klasik yang harus dipenuhi dari metode estimasi OLS adalah sebagai berikut:

1. Galat e_i merupakan variabel random dan memiliki distribusi normal.
2. Nilai rata-rata dari galat setiap periode tertentu adalah nol.

$$E[e_i] = 0$$

(3.2)

3. Tidak ada hubungan korelasi yang kuat antar variabel bebas.
4. Varians dari galat adalah konstan untuk setiap periode, dimana σ^2 adalah konstan

$$E[e_i^2] = \sigma^2, \quad (3.3)$$

Galat dari pengamatan yang berbeda tidak saling mempengaruhi, dimana $i \neq j$

$$E[e_i e_j] = 0, \quad (3.4)$$

5. Galat tidak tergantung oleh variabel bebas, untuk seluruh $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$

$$E[X_i e_j] = X_i E[e_j] = 0 \quad (3.5)$$

3.3.2. Uji Hipotesa

Parameter-parameter hasil estimasi dengan metode OLS kemudian diuji secara statistik untuk menguji apakah hipotesa bisa diterima atau tidak. Uji hipotesa adalah suatu anggapan atau pendapat yang diterima secara kuantitatif untuk mengolah suatu

fakta sebagai fakta untuk penelitian. Pengujian dilakukan untuk menentukan baik atau buruknya model melalui uji kesesuaian model (R^2), uji secara serempak (F test) maupun uji secara parsial (t test), untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesa nol.

(1). Uji Kesesuaian (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur kebaikan atau kesesuaian suatu model persamaan regresi, lebih dari dua variabel. Koefisien determinasi majemuk R^2 memberikan proporsi atau prosentase variasi total dalam variabel tak bebas Y dengan variabel bebas X secara bersama-sama. Besaran R^2 dihitung dengan :

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} = \frac{ESS}{TSS} \quad (3.13)$$

Besaran R^2 terletak antara 0 dan 1, jika $R^2 = 1$ berarti bahwa semua variasi dalam variabel terikat Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X yang digunakan dalam model regresi, sebesar 100%. Jika $R^2 = 0$ berarti tidak ada variasi dalam variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas X. Model dikatakan baik jika R^2 mendekati 1.

(2). Uji Secara Serempak (uji F)

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah seluruh variabel bebas yang ada dalam model secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

Langkah-langkah pengujian :

1. Menetapkan hipotesa

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$; dimana variabel-variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel terikat.

$H_1 = \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_n \neq 0$; dimana variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat.

2. Menetapkan daerah kritis melihat F-tabel dan mencari nilai F-hitung dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{(R_u^2 - R_r^2) / q}{(1 - R_u^2) / n - k} \quad (3.14)$$

Dimana :

R_u^2 = nilai R-squared yang tidak direstriksi, yaitu pengujian yang dianggap memiliki heteroskedastisitas dan ada serial korelasi antar *error term*

R_r^2 = nilai R-squared yang telah direstriksi yaitu pengujian yang dianggap memiliki homokedastisitik dan tidak ada serial korelasi antar *error term*

q = jumlah variabel yang direstriksi

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel bebas +1 (intersep)

3. Membuat kesimpulan

Apabila F-hitung berada didaerah menerima H_0 berarti F-stat terbukti tidak berpengaruh, jika F-hitung berada didaerah menerima H_1 berarti F-stat terbukti berpengaruh.

(3). Uji Secara Parsial (uji T)

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t-statistik, dimaksudkan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model secara individual dapat mempengaruhi variabel terikat. Langkah-langkah pengujian t-statistik sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesa

- a. Hipotesa positif dan signifikan

H_0 = masing-masing koefisien regresi nilainya ≤ 0

H_1 = masing-masing koefisien regresi nilainya > 0

b. Hipotesa negatif dan signifikan

$H_0 =$ masing-masing koefisien regresi nilainya ≥ 0

$H_1 =$ masing-masing koefisien regresi nilainya $= 0$

2. Menetapkan daerah kritis melalui t-tabel, mencari t-hitung sebagai berikut :

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{S}_j} \quad (3.15)$$

sedangkan

$$\hat{S}_j = \sqrt{\left(\frac{1}{n-k} \sum e_i^2\right)(X'X)^{-1}_{jj}} \quad (3.16)$$

dimana : $\hat{\beta}_j =$ koefisien penduga variabel ke j

$\hat{S}_j =$ koefisien standar error variabel ke j

$e_i^2 =$ residual sum of squares

3. Membuat kesimpulan

Jika nilai uji t lebih kecil dari nilai t berdasarkan suatu *level of significance* (nilai t tabel) maka hipotesis nol (H_0) diterima, berarti uji t dianggap tidak signifikan. Sebaliknya bila nilai uji t lebih besar dari pada nilai t tabel maka hipotesis nol (H_0) ditolak, berarti uji t dianggap signifikan.

3.4. Post Estimate

Setelah metode estimasi ditetapkan dan persamaan regresi didapatkan selanjutnya adalah menghitung pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan penerima BLT menggunakan model yang sudah disusun. Proses ini disebut dengan *post estimate* karena melakukan estimasi setelah koefisien model regresi didapatkan.

Teknik menghitung pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan dari rumah tangga BLT adalah dengan mengalikan nilai koefisien regresi dari masing-masing

model dengan semua variabel terpilih dari data penerima BLT. Dalam penelitian ini, hanya koefisien regresi yang nyata mempengaruhi pengeluaran rumah tangga saja yang digunakan, sehingga dalam proses penghitungan dengan STATA menggunakan prosedur STEPWISE REGRESSION. Dengan teknik STEPWISE ini secara otomatis pelanggaran asumsi klasik yaitu adanya kasus multikolinearitas sudah dapat diatasi, oleh karena variabel-variabel bebas (*independent variables*) yang berkorelasi sudah dikeluarkan dari model. Prosedur menghitung POST ESTIMATE dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.5. Garis Kemiskinan 2006 Revisi dan Penentuan Keakuratan Sasaran

Setelah pengeluaran rumah tangga perkapita sebulan dari data penerima BLT sudah dihitung, selanjutnya diteliti apakah rumah tangga penerima BLT 2005 adalah rumah tangga miskin atau tidak miskin. Untuk menentukan apakah rumah tangga penerima BLT 2005 terkategori miskin atau tidak miskin maka digunakan Garis Kemiskinan 2006 Revisi. Rumah tangga penerima BLT 2005 dikatakan miskin jika pengeluaran rumah tangga per kapita sebulannya di bawah Garis Kemiskinan 2006 Revisi dan rumah tangga penerima BLT 2005 dikatakan tidak miskin jika pengeluaran rumah tangga per kapita sebulannya di atas atau sama dengan Garis Kemiskinan 2006 Revisi. Yang dimaksud dengan Garis Kemiskinan 2006 Revisi adalah garis kemiskinan 2006 hasil penghitungan BPS yang sudah diturunkan sebesar 16 persen seperti pada Tabel 3.6.

Dasar penentuan 16 persen adalah mengacu pada temuan salah seorang ahli kemiskinan BPS yaitu Dr. Puguh Bodro Wirawan dalam bukunya berjudul *Perkembangan dan Dimensi Kemiskinan, Survei Seratus Desa, Seri SSD No. 3*, yang menyatakan bahwa jika menggunakan data Susenas Kor maka Garis Kemiskinan Susenas yang dihitung dari data Modul harus disesuaikan sebesar 16 persen.

No	Provinsi	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DKI Jakarta	248,024	-	248,024
2	Nusa Tenggara Timur	131,625	87,279	115,203
3	Sulawesi Utara	172,775	148,887	155,061
4	Gorontalo	139,091	119,558	122,286

Sumber: BPS 2006, data diolah

Setelah Garis Kemiskinan 2006 Revisi dihitung selanjutnya dihitung nilai salah sasaran/*leakage/mistargetingnya*. *Leakage* adalah rumah tangga yang tidak miskin namun mendapatkan bantuan BLT. Di sini maksudnya adalah pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan data BLT 2005 tersebut - setelah dihitung dengan *post estimate* - berada di atas atau sama dengan garis kemiskinan¹. Nilai *leakage* adalah dalam referensi setahun. Jadi, besaran nilai rupiah dari *leakage* dihitung dari jumlah rumah tangga hasil PSE 2005 yang berada di atas atau sama dengan garis kemiskinan dikalikan dengan Rp. 1.200.000,-.

Penghitungan salah sasaran (*leakage*) – baik dalam persentase maupun rupiah - dilakukan hanya untuk data gabungan perkotaan dan perdesaan saja, karena informasi daerah tidak dikumpulkan dalam kegiatan PSE 2005.

Jika seluruh rumah tangga penerima BLT adalah rumah tangga miskin maka besaran anggaran BLT 2005 yang telah dialokasikan kepada 4 propinsi adalah seperti pada Tabel 3.7.

¹ Dalam penelitian ini angka *undercoverage* tidak dapat dihitung karena data rumah tangga miskin yang tidak *tercover* dalam BLT diasumsikan nol (*zero error*)

Tabel 3.7:
Jumlah Rumah Tangga Penerima BLT dan Anggaran BLT 4 Propinsi

No	Propinsi	RT Penerima BLT	Budget
1	DKI Jakarta	160,480	192,576,000,000
2	Nusa Tenggara Timur	623,137	747,764,400,000
3	Sulawesi Utara	127,295	152,754,000,000
4	Gorontalo	102,731	123,277,200,000

Sumber: PSE 2005, data diolah

3.6. Mengukur Indikator Kemiskinan

Untuk mengukur indikator kemiskinan dalam penelitian ini dihitung *Head Count Index* (HCI) serta Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbecke* (1984) sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

dimana:

α = 0, 1, 2

z = garis kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

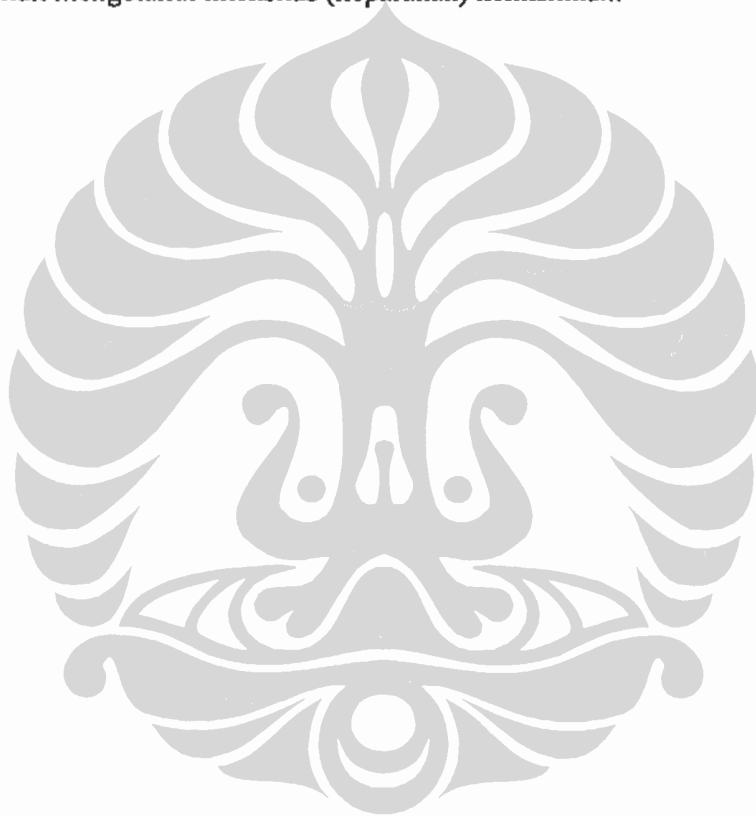
q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Jika $\alpha=0$ maka diperoleh *Head Count Index* (P_0) yang menggambarkan persentase rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan; $\alpha=1$ adalah *Poverty Gap Index* (P_1); dan $\alpha=2$ merupakan ukuran *Poverty Severity Index* (P_2).

Poverty Gap Index (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai *Poverty Gap Index* (P_1) ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Poverty Severity Index (P_2) sampai batas tertentu dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas (keparahan) kemiskinan.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Kemiskinan dalam Bab ini membahas keadaan tahun 2005-2006 sesuai dengan tahun dimana BLT dijalankan. Sementara pembahasan pada sub bab berikutnya diarahkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

4.1. Tingkat Kemiskinan 2005-2006

Pada Juli 2005 jumlah penduduk miskin secara nasional tercatat sebesar 36,8 juta jiwa atau 16,69 persen dari total penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin secara nasional meningkat sebesar 1,81 persen. Begitu pula pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin secara nasional meningkat 6,77 persen dibanding tahun 2005 menjadi 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen dari total penduduk Indonesia.

Bila dilihat menurut daerah, persentase penduduk miskin di perdesaan (20,63 persen) lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (12,48 persen) pada tahun 2005. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam periode 2004-2005 terjadi peningkatan penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 16,96 persen, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 5,14 persen. Begitu pula pada tahun 2006 penduduk miskin di perdesaan (21,81 persen) lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan (13,47 persen). Dalam periode 2005-2006 terjadi peningkatan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, dimana masing-masing daerah mengalami peningkatan sebesar 8,96 persen dan 5,54 persen.

Dari angka kemiskinan tahun 2005 antar propinsi terlihat bahwa ada enam propinsi yang dapat dikategorikan memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah (angkanya berada di bawah *hard core*, yaitu di bawah 10 persen). Keenam

propinsi tersebut adalah Propinsi Bangka Belitung (9,74 persen), Propinsi Sulawesi Utara (9,34 persen), Propinsi Banten (8,86 persen), Propinsi Kalimantan Selatan (7,23 persen), Propinsi Bali (6,72 persen), dan Propinsi DKI Jakarta (3,61 persen). Sedangkan pada tahun 2006 hanya ada empat yaitu Propinsi Banten (9,79 persen), Propinsi Kalimantan Selatan (8,32 persen), Propinsi Bali (7,08 persen), dan Propinsi DKI Jakarta (4,57 persen). Dua propinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar (di atas 30 persen) pada tahun 2005 adalah Propinsi Papua (40,83 persen) dan Propinsi Maluku (32,28 persen), sedangkan pada tahun 2006 ada tiga propinsi yaitu Papua (41,52 persen), propinsi Irian Jaya Barat (41,34 persen) dan Propinsi Maluku (33,03 persen).

Distribusi secara nasional pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 36,13 persen penduduk miskin berdomisili di daerah perkotaan dan 63,87 persen sisanya berada di daerah perdesaan. Pada tahun 2006 sebesar 36,87 persen penduduk miskin berdomisili di daerah perkotaan dan 63,13 persen berada di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan.

4.2. Perbandingan Beberapa Karakteristik Kemiskinan di Empat Propinsi

Tabel 4.1. menampilkan persentase penduduk miskin di empat propinsi yang diteliti pada tahun 2005-2006. Tampak bahwa jumlah penduduk miskin di Gorontalo dan NTT menempati urutan pertama dan kedua jika dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Tingkat kemiskinan akan semakin nyata jika dilihat menurut daerah. Persentase penduduk miskin di perdesaan NTT dan Gorontalo hampir dua kali lipat persentasenya di perkotaan. Dengan pengecualian DKI Jakarta, Tabel 4.1. juga menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat penduduk di perdesaan NTT, Sulawesi Utara, dan Gorontalo adalah penduduk miskin.

Tabel 4.1:
 Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi dan Daerah,
 2005-2006

Propinsi	2005	2006	2005	2006	2005	2006
	Kota	Kota	Desa	Desa	K+D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	3,61	4,57	-	-	3,61	4,57
Nusa Tenggara Timur	17,85	18,77	30,46	31,68	28,19	29,34
Sulawesi Utara	4,96	7,01	12,70	15,05	9,34	11,54
Gorontalo	17,23	13,9	34,43	36,14	29,05	29,13
Indonesia	12,48	13,47	20,63	21,81	16,69	17,75

Sumber: BPS, 2006a

Pola yang hampir sama juga terjadi pada tahun 2006 dengan catatan bahwa persentase rumah tangga miskin di perdesaan cenderung meningkat dibandingkan dengan keadaan 2005. Hal ini sesuai dengan fenomena umum yang terjadi secara nasional bahwa memang lebih banyak rumah tangga miskin di perdesaan.

Tabel 4.2:
 Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Propinsi dan Daerah, 2005-2006

Propinsi	2005	2006	2005	2006	2005	2006
	Kota	Kota	Desa	Desa	K+D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,40	11,62	88,60	88,38	100,00	100,00
Sulawesi Utara	23,04	26,54	76,96	73,46	100,00	100,00
Gorontalo	18,55	15,05	81,45	84,95	100,00	100,00
Indonesia	36,13	36,87	63,87	63,13	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2006a

Salah satu cara untuk melihat aspek kemiskinan adalah melalui indeks kedalaman dan keparahan agar lebih tampak problema yang terjadi pada masing-masing propinsi yang diteliti. Berdasarkan Tabel 4.3a, 4.3b, dan 4.3c tampak bahwa tingkat kemiskinan sangat mengkhawatirkan di Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo karena nilai p1 dan p2 sangat tinggi dibandingkan Sulawesi Utara dan DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan satu propinsi program PKH yang mempunyai tingkat kedalaman dan keparahan yang relatif kecil, yang mengindikasikan permasalahan kemiskinan di DKI Jakarta tidak separah di tiga propinsi lainnya yang diteliti.

Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2006, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan cenderung sama, walau pun dapat dikatakan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo ada perbaikan karena p1 dan p2 cenderung turun dibandingkan tahun 2005.

Tabel 4.3a:
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya
Kemiskinan (P2) di Perkotaan 2005 dan 2006

Propinsi (1)	2005	2006	2006	2006
	P1 (%) (2)	P1 (%) (3)	P2 (%) (4)	P2 (%) (5)
DKI Jakarta	0,78	0,75	0,20	0,19
Nusa Tenggara Timur	1,43	1,56	0,28	0,43
Sulawesi Utara	2,63	1,35	0,81	0,34
Gorontalo	2,08	1,71	0,56	0,47
Indonesia	2,30	2,18	0,66	0,60

Sumber: BPS, 2006a

Tabel 4.3b:
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di Perdesaan, 2005 dan 2006

Propinsi	2005	2006	2006	2006
	P1 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	6,79	6,55	2,00	1,86
Sulawesi Utara	2,38	3,82	0,65	1,11
Gorontalo	8,17	9,07	2,80	2,92
Indonesia	3,37	4,08	0,92	1,15

Sumber: BPS, 2006a

Tabel 4.3c:
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) di Perkotaan dan Perdesaan, 2005 dan 2006

Propinsi	2005	2006	2006	2006
	P1 (%)	P1 (%)	P2 (%)	P2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	0,78	0,75	0,20	0,19
Nusa Tenggara Timur	5,91	5,74	1,72	1,63
Sulawesi Utara	2,48	2,87	0,71	0,82
Gorontalo	6,52	6,05	2,19	1,86
Indonesia	2,90	3,25	0,80	0,91

Sumber: BPS, 2006a

Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase laki-laki dan perempuan dari penduduk miskin cenderung relatif sama dengan perbandingan sekitar 50 persen. Tabel 4.4a menunjukkan bahwa polanya tidak berubah baik pada tahun 2005 maupun 2006.

Namun jika dilihat menurut perbandingan antar jenis kelamin, tampak bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki cenderung lebih banyak pada empat propinsi

yang diteliti. Meskipun demikian, persentase kepala rumah tangga miskin laki-laki di DKI Jakarta cenderung lebih besar. Tabel 4.4b menunjukkan bahwa polanya tidak berubah baik pada tahun 2005 maupun 2006.

Tabel 4.4a:
Persentase Penduduk Miskin Menurut
Propinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2005-2006

Propinsi (1)	2005	2006	2005	2006	2005	2006
	Laki-laki (2)	Laki-laki (3)	Perempuan (4)	Perempuan (5)	L+P (6)	L+P (7)
DKI Jakarta	50,80	51,56	49,20	48,44	100,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	49,50	50,54	50,50	49,46	100,00	100,00
Sulawesi Utara	50,76	50,88	49,24	49,12	100,00	100,00
Gorontalo	50,54	51,91	49,46	48,09	100,00	100,00
Indonesia	50,19	50,43	49,81	49,57	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2006a

Tabel 4.4b:
Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut
Propinsi dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Tahun 2005-2006

Propinsi (1)	Laki-laki (2)	Laki-laki (3)	Perempuan (4)	Perempuan (5)	L+P (6)	L+P (7)
	DKI Jakarta	88,12	86,69	11,88	13,31	100,00
Nusa Tenggara Timur	92,45	92,90	7,55	7,10	100,00	100,00
Sulawesi Utara	94,45	94,97	5,55	5,03	100,00	100,00
Gorontalo	94,55	94,37	5,45	5,63	100,00	100,00
Indonesia	91,63	91,32	8,37	8,68	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2006a

4.3. Hasil Estimasi

4.3.1. Ketepatan Model

Untuk melihat ketepatan model dapat dilihat dengan membandingkan nilai adjusted R^2 dari ketiga model menurut propinsi. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada Model 1, 2, dan 3, nilai adjusted R^2 berkisar antara 0,0207 hingga 0,3403. Nilai adjusted R^2 terbesar terjadi di propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu masing-masing sebesar 0,2092; 0,2526; dan 0,3403. Ini berarti variasi pengaruh yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas dalam model terhadap pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan adalah berkisar antara 20,92 persen hingga 34,03 persen, sementara 65,97 persen hingga 79,08 persen dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model.

Tabel 4.5:
Nilai Adjusted R^2 Menurut Propinsi dan Model

Propinsi	Adjusted R2		
	Model 1	Model 2	Model 3
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI Jakarta	0,0207	0,1414	0,1414
NTT	0,2092	0,2526	0,3403
Sulawesi Utara	0,0896	0,1306	0,2038
Gorontalo	0,0905	0,1902	0,2304

Sumber: data diolah

Rendahnya nilai Adjusted R^2 ini disebabkan jumlah data yang dianalisis adalah hanya rumah tangga miskin. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jumlah rumah tangga miskin yang terdapat dalam data Kor 2006 berdasarkan Garis Kemiskinan 2006 adalah hanya sebesar 10 hingga 29 persen dari seluruh rumah tangga yang dicacah dalam Susenas 2006. Untuk tiga Model PMT ini, jumlah rumah tangga miskin yang diteliti adalah sebanyak 732 rumah tangga di DKI Jakarta, 2.014 rumah tangga di Nusa

Tenggara Timur, 1.215 rumah tangga di Sulawesi Utara, dan 975 rumah tangga di Gorontalo.

4.3.2. Model Regresi Menurut Propinsi

a. MODEL PROPINSI DKI JAKARTA

Model 1 Propinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada Model 1 hanya 4 variabel saja yang nyata dalam hubungannya dengan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan.

Tabel 4.6a:
Model 1 Propinsi DKI Jakarta

Nama Variabel (1)	Variabel (2)	Coef. (3)	Std, Err, (4)	[95% Conf, Interval]	
				(5)	(6)
Pendidikan KRT	hheduc	6.570*	2.795	1.083	12.057
Sumber penerangan	lighting	43.746*	21.585	1.370	86.122
Jenis Dinding	twall	7.695*	3.050	1.706	13.684
Konstanta	cons	192.586	21.506	150.365	234.808

Sumber: Data diolah

Keterangan:

R²Adjusted: 0.0207

Fhitung: 6.15

N observasi: 732

Model 1 memperlihatkan bahwa dari 8 variabel BLT yang digunakan dalam penentuan rumah tangga penerima BLT dalam PSE 2005 ternyata, hanya pendidikan kepala rumah tangga, sumber penerangan, dan jenis dinding yang mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan yang berbeda. Rumah tangga yang KRTnya berpendidikan SLTP ke atas mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga lebih tinggi sebesar Rp. 6.570,- dibandingkan rumah tangga yang KRTnya berpendidikan SD atau tidak bersekolah/tidak menyelesaikan SD.

Sementara itu, rumah tangga yang sumber penerangannya listrik PLN mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan lebih tinggi sebesar Rp. 43.746,- dibandingkan rumah tangga yang sumber penerangannya bukan PLN. Rumah tangga

yang menggunakan jenis dinding batu bata/semen mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan lebih tinggi sebesar Rp. 7.695,- Lihat Tabel 4.6a.

Model 2 memperlihatkan bahwa dari 17 variabel BLT yang digunakan ternyata hanya 4 variabel yang nyata mempengaruhi pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan. Keempat variabel tersebut adalah jumlah anggota rumah tangga, sumber penerangan, jenis dinding, dan fasilitas buang air besar. Dalam model 2 ini ternyata rata-rata pengeluaran rumah tangga yang kepala rumah tangga berpendidikan SLTP dan di atasnya tidak berbeda dengan rata-rata pengeluaran rumah tangga yang KRTnya berpendidikan SD ke bawah. Yang menarik di sini justru masuknya jumlah anggota rumah tangga dalam model 2 yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengeluaran rumah tangga sebulan. Ini berarti semakin banyak art semakin banyak pengeluaran rumah tangga yang dikeluarkan, namun dalam hal per kapita, pengeluaran rumah tangga dengan art lebih banyak akan sedikit lebih kecil sebesar Rp. 8.196,- dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga dengan art yang lebih sedikit. Secara ekonomi dapat dikatakan, setiap penambahan sebanyak 1 orang anggota rumah tangga akan menurunkan pengeluaran rumah tangga perkapita sebulan yaitu sebesar Rp 8.196,-. Lihat Tabel 4.6b.

Tabel 4.6b:
Model 2 Propinsi DKI Jakarta

Nama Variabel (1)	Variabel (2)	Coef, (3)	Std, Err, (4)	[95% Conf, Interval]	
				(5)	(6)
Jumlah Art	hhsz	-8.196 **	788	-9.743	-6.649
Sumber penerangan	Lighting	43.761*	20.186	4.131	83.391
Jenis Dinding	twall	10.752*	2.968	4.924	16.579
Fasilitas BAB	toilet	8.539*	2.741	3.158	13.919
Konstanta	cons	232.432	20.526	192.135	272.729

Sumber: Data diolah

Keterangan:

R²Adjusted: 0.1414

Fhitung: 31.10

N observasi: 732

Rumah tangga yang sumber penerangannya listrik PLN mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan lebih tinggi sebesar Rp. 43.762,- dibandingkan rumah tangga yang sumber penerangannya bukan PLN. Rumah tangga yang menggunakan jenis dinding batu bata/semen mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan lebih tinggi sebesar Rp. 10.752,-, sedangkan rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga lebih tinggi sebesar Rp. 8.539,- dibandingkan rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar bukan milik sendiri.

Tbel 4.6c:
Model 3 Propinsi DKI Jakarta

Nama Variabel (1)	Variabel (2)	Coef, (3)	Std, Err, (4)	[95% Conf, Interval]	
				(5)	(6)
Sumber penerangan	lighting	43.761*	20.186	4.131	83.391
Jumlah art	hhsz	-8.196**	788	-9.743	-6.649
Jenis Dinding	twall	10.752*	2.968	4.924	16.579
Fasilitas BAB	toilet	8.539*	2.741	3.158	13.919
Konstanta	cons	232.432	20.526	192.135	272.729

Sumber: Data diolah
Keterangan:
R²Adjusted: 0.1414
Fhitung: 31.10
N observasi: 732

Model 3 memperlihatkan bahwa dari 25 variabel BLT dan variabel PODES yang digunakan ternyata tetap hanya 4 variabel yang nyata mempengaruhi pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan. Keempat variabel tersebut adalah jumlah anggota rumah tangga, sumber penerangan, jenis dinding, dan fasilitas buang air besar. Pengaruh jumlah anggota rumah tangga dalam model 3 juga menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pengeluaran rumah tangga sebulan. Ini berarti semakin banyak art semakin banyak pengeluaran rumah tangga yang dikeluarkan, namun dalam hal per kapita, pengeluaran rumah tangga dengan art lebih banyak akan sedikit lebih kecil

sebesar Rp. 8.196,- dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga dengan art yang lebih sedikit. Secara ekonomi dapat dikatakan, setiap penambahan sebanyak 1 orang anggota rumah tangga akan menurunkan pengeluaran rumah tangga perkapita sebulan yaitu sebesar Rp 8.196,-.

Rumah tangga yang sumber penerangannya listrik PLN mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita sebulan lebih tinggi sebesar Rp. 43.761,- dibandingkan rumah tangga yang sumber penerangannya bukan PLN. Rumah tangga yang menggunakan jenis dinding batu bata/semen mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan lebih tinggi sebesar Rp. 10.752,-, sedangkan rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga lebih tinggi sebesar Rp. 8.539,- dibandingkan rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar bukan milik sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa dari 3 model yang dibangun dengan Model PMT, propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi yang tidak ada pengaruh efek lokasi. Ini berarti secara umum dapat dikatakan bahwa permasalahan kemiskinan (tingkat kesejahteraan) di DKI Jakarta tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang berkaitan dengan infrastruktur. Baik pada Model 1, 2, hingga 3, dari seluruh variabel yang digunakan hanya 4 variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan atau tingkat kesejahteraan yaitu sumber penerangan, jumlah anggota rumah tangga, jenis dinding, dan fasilitas buang air besar.

Sementara itu, tiga variabel yaitu sumber penerangan, jenis dinding, dan fasilitas buang air besar berpengaruh positif terhadap pengeluaran rumah tangga. Namun pengaruh jumlah art di DKI adalah negative. Secara ekonomi ini berarti, jumlah art di DKI yang semakin banyak menambah beban pengeluaran, yang berarti semakin membuat rumah tangga semakin terpuruk di bawah garis kemiskinan.

b. MODEL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Model 1 hingga Model 3 Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada Model 1 hanya 7 variabel saja yang nyata dalam hubungannya dengan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan.

Tabel 4.7a:
Model 1 Propinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Variabel	Variabel	Coef	Std Err	[95% Conf. Interval]	
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas lantai per kapita	Pcfloor	106*	45	17	195
Jenis lantai	Tfloor	3.402**	842	1.750	5.055
Jenis Dinding	Twall	-2.189*	1.105	-4.356	-22
Fasilitas BAB	Toilet	-2.047*	802	-3.620	-474
Pendidikan KRT	Hheduc	5.409**	1.038	3.373	7.446
Sumber penerangan	Lighting	11.396**	1.028	93.808	13.412
Lapangan Usaha Pertanian	hhsector1	-10.363**	1.031	-12.385	-8.340
Konstanta	cons	93.743	1.194	91.402	96.084

Sumber: Data diolah

Keterangan:

R²Adjusted: 0.2095

Fhitung: 77.08

N observasi: 2014

Model 1 yang ingin melihat pengaruh 8 variabel BLT terhadap pengeluaran rumah tangga sebulan memperlihatkan bahwa jika pemerintah akan melaksanakan pendataan rumah tangga miskin menggunakan variabel PSE maka hanya 7 variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, yaitu luas lantai per kapita, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, pendidikan KRT, sumber penerangan, dan lapangan usaha pertanian. Rata-rata pengeluaran rumah tangga dengan jenis dinding batu bata/semen mempunyai pengeluaran lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga dengan jenis dinding bukan batu bata/semen yaitu sebesar Rp. 2.189,-. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar bersama mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan lebih sedikit yaitu sebesar Rp. 2.047,-

Model 1 juga menunjukkan hasil yang konsisten dengan fenomena kemiskinan di Indonesia, yaitu rumah tangga miskin yang KRTnya bekerja di sektor pertanian mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan yang lebih kecil dibandingkan rumah tangga yang KRTnya bekerja di sektor selain pertanian, yaitu sebesar Rp. 10.363,-.

Tabel 4.7b:
Model 2 Propinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Variabel (1)	Variabel (2)	Coef. (3)	Std. Err, (4)	[95% Conf, Interval]	
				(5)	(6)
Jumlah art	hsize	-1.502**	212	-1.918	-1.085
Jenis lantai	tfloor	3.502**	817	1.901	5.104
Jenis Dinding	hheduc	2.739*	1.046	687	4.791
Fasilitas BAB	toilet	-2.229*	778	-3.755	-702
Wanita dalam BerKB	wmn1049	2.733*	882	1.003	4.463
Sumber penerangan	Lighting	9.671**	997	7.717	11.626
Lapangan Usaha Pertanian	hhsector1	-5.590**	1.175	-7.894	-3.286
Jumlah anak sekolah SMA	sschild	6.048**	1.281	3.535	8.561
Lapangan Usaha Jasa	hhsector3	12.167**	1.710	8.814	15.520
Konstanta	cons	98.058	1.705	94.714	101.403

Sumber: Data diolah

Keterangan:

R²Adjusted: 0.2526

Fhitung: 76.61

N observasi: 2014

Pada Model 2, rata-rata pengeluaran rumah tangga yang ada wanita usia subur berpartisipasi dalam KB lebih besar sebesar Rp. 2.733,- dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak ada wanita usia subur yang berpartisipasi dalam KB. Pengaruh banyaknya anak sekolah SMA terhadap pengeluaran rumah tangga dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu setiap penambahan 1 (satu) anak yang sekolah di SMA maka rata-rata pengeluaran rumah tangga akan meningkat sebesar Rp. 6.048,-.

Model 3 memperlihatkan pola pengaruh variabel yang sama dengan Model 2 namun ada penambahan sektor pertanian (pengaruhnya negatif) dan sektor jasa (pengaruhnya positif) terhadap kemiskinan. Ini berarti rumah tangga yang KRTnya

bekerja di sektor pertanian cenderung mendapatkan penghasilan yang rendah, sementara yang KRTnya bekerja di sektor jasa cenderung akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Secara ekonomi, ini berarti orang miskin cenderung akan tambah miskin (tidak meningkat pengeluaran rumah tangga karena pendapatan berkurang) jika terus bekerja pada sektor pertanian. Mereka harus diarahkan pada pekerjaan yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi, salah satunya ke sektor jasa.

Disamping itu, beberapa variabel desa seperti jarak ke kantor desa, jenis permukaan jalan, keberadaan bidan, dan kepadatan penduduk juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga di Nusa Tenggara Timur.

Tabel 4.7c:
Model 3 Propinsi Nusa Tenggara Timur

Nama Variabel (1)	Variabel (2)	Coef, (3)	Std, Err, (4)	[95% Conf, Interval]	
				(5)	(6)
Luas Lantai Per Kapita	pcffloor	92*	42	10	174
Jenis lantai	Tffloor	2.527*	773	1.011	4.044
Kepadatan Penduduk	villpdens	3**	0	3	4
Fasilitas BAB	toilet	-1.815*	734	-3.256	-375
Wanita dalam BerKB	wmn1049	1.925*	831	295	3.556
Sumber penerangan	lighting	5.138**	991	3.194	7.081
Lapangan Usaha Pertanian	hhsector1	-2.400*	1.123	-4.603	-197
Jenis Permukaan Jalan	villrtype	-4.012**	840	-5.659	-2.365
Lapangan Usaha Jasa	hhsector3	6.016**	1.658	2.764	9.268
Pendidikan KRT	hheduc	3.042*	984	1.111	4.972
Jumlah Art	hhsize	-1.404**	204	-1.803	-1.004
Jumlah anak sekolah SMA	sschild	3.927*	1.214	1.546	6.309
Keberadaan Bidan	villbidan	2.047*	965	154	3.939
Jarak kantor Desa ke Kab	vill2dist	-50*	13	-76	-25
Konstanta	cons	97.595	1.988	93.696	101.494

Sumber: Data diolah

Keterangan:

R²Adjusted: 0.3403

Fhitung: 75.17

N observasi: 2014

Model 3 juga menunjukkan jarak kantor desa ke kab/kota, dan jenis permukaan jalan berpengaruh negatif. Ini berarti akses terhadap fasilitas kantor dan jenis permukaan jalan selama ini menjadikan Nusa Tenggara Timur menjadi propinsi

termiskin. Tampaknya, akses terhadap fasilitas fasilitas ini belum sepenuhnya baik di Nusa Tenggara Timur. Rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan dari rumah tangga yang desanya mempunyai bidan lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga yang desanya tidak tersedia bidan yaitu sebesar Rp. 2.047,-. Pengaruh jarak dari kantor desa ke kabupaten/kota adalah negatif terhadap pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan, sementara kepadatan penduduk di desa berpengaruh positif. Setiap penambahan 1 km jarak dari kantor desa ke kab/kota akan menurunkan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan sebesar Rp. 51,-. Sedangkan penambahan rata-rata 1 orang per km² akan menaikkan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan sebesar Rp. 3,-.

c. MODEL PROPINSI SULAWESI UTARA

Model 1 hingga Model 3 Propinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada Model 1 hanya 5 variabel saja yang nyata dalam hubungannya dengan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan.

Tabel 4.8a:
Model 1 Propinsi Sulawesi Utara

Nama Variabel	Variabel	Coef,	Std, Err,	[95% Conf, Interval]	
				(1)	(2)
Luas Lantai Per Kapita	pcfloor	618*	128	367	869
Sumber Penerangan	lighting	6.146*	2.466	1.308	10.985
Lapangan Usaha Pertanian	hhsector1	-11.552**	1.651	-14.791	-8.313
Fasilitas BAB	toilet	4.054*	1.622	871	7.237
Pendidikan KRT	hheduc	6.017**	1.630	2.820	9.214
Konstanta	cons	139.067	2.861	133.454	144.679

Sumber: Data diolah

Keterangan:

R²Adjusted: 0.0896

Fhitung: 24.89

N observasi: 1215

Pada Model 1, dari 8 variabel BLT hanya 5 variabel yang nyata mempengaruhi pengeluaran rumah tangga sebulan yaitu luas lantai per kapita, sumber penerangan,

rumah tangga yang KRTnya bekerja di sektor pertanian, fasilitas buang air besar, dan pendidikan kepala rumah tangga. Setiap kenaikan 1 m² luas lantai per kapita akan menaikkan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan sebesar Rp. 617,-. Rata-rata pengeluaran rumah tangga yang sumber penerangannya PLN lebih besar Rp. 6.146,- dibandingkan dengan rumah tangga yang sumber penerangannya bukan PLN. Rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar milik sendiri mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi sebesar Rp. 4.054,- dibandingkan dengan rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar bukan milik sendiri. Rumah tangga yang KRT berpendidikan minimal SLTP mempunyai rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan yang lebih tinggi sebesar Rp. 6.017,- dibandingkan dengan rumah tangga yang KRTnya berpendidikan SD atau di bawahnya.

Tabel 4.8b:
Model 2 Propinsi Sulawesi Utara

Nama Variabel	Variabel	Coef,	Std, Err,	[95% Conf, Interval]	
				(1)	(2)
Luas Lantai Per Kapita	pcfloor	305*	132	46	565
Pendidikan KRT	hheduc	4.969*	1.610	1.810	8.128
Jumlah Art	hhsz	-4.713**	596	-5.882	-3.545
Fasilitas BAB	toilet	5.512*	1.599	2.375	8.648
Jumlah Anak SMP	jschild	3.926*	1.761	470	7.381
Sumber Penerangan	lighting	7.486*	2.422	2.734	12.238
Lapangan Usaha Jasa	hhsector3	13.029**	2.278	8.559	17.499
Lapangan Usaha Industri	hhsector2	12.257**	2.233	7.876	16.638
Konstanta	cons	149.791	3.661	142.609	156.973

Sumber: Data diolah

R²Adjusted: 0.1306

Fhitung: 23.80

N observasi: 1215

Pada Model 2, variabel KRT yang bekerja di sektor pertanian tidak berpengaruh dalam menjelaskan model ini. Justru yang masuk dalam model adalah variabel KRT yang bekerja di sektor jasa dan industri. Pada model ini disamping dua variabel ini,

jumlah anggota rumah tangga dan jumlah anak yang sekolah di SMP juga mempengaruhi pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan. Rumah tangga yang KRTnya bekerja di sektor industri dan jasa lebih besar pengeluaran rumah tangga per kapita sebulannya yaitu masing-masing sebesar Rp. 13.029,- dan Rp. 12.257,- dibandingkan dengan yang bekerja di sektor bukan industri dan bukan jasa. Besarnya anggota rumah tangga di Sulawesi Utara juga berpengaruh negatif terhadap pengeluaran rumah tangga. Setiap penambahan 1 orang anggota rumah tangga di Sulawesi Utara akan menurunkan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp. 4.713,- Setiap penambahan satu orang anak yang sekolah di SD akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp. 3.925,-.

Tabel 4.8c:
Model 3 Propinsi Sulawesi Utara

Nama Variabel	Variabel	Coef.	Std, Err,	[95% Conf, Interval]	
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luas Lantai Per Kapita	Pcfloor	433*	127	183	683
Kepadatan Penduduk	villpdens	1,5**	0	1	2
Jarak Kantor Desa ke Kab	vill2dist	-65*	27	-118	-13
Fasilitas BAB	toilet	4.494*	1.564	1.426	7.561
Keberadaan Polindes	villpolin	-10.691**	1.647	-13.923	-7.460
Sumber Penerangan	lighting	5.516*	2.325	954	10.078
Jumlah Anak SMP	Jschild	4.505*	1.688	1.194	7.816
Lapangan Usaha Industri	hhsector2	7.547*	2.199	3.232	11.862
Lapangan Usaha Jasa	hhsector3	6.494*	2.272	2.036	10.951
Pendidikan KRT	hheduc	4.937*	1.543	1.910	7.964
Jumlah Art	hhsize	-4.938**	572	-6.060	-3.817
Konstanta	cons	157.802	3.737	150.471	165.134

Sumber: Data diolah

Keterangan:

R2Adjusted: 0.2038

Fhitung: 29.25

N observasi: 1215

Pada Model 3, pola pengaruh variabel-variabel Potensi Desa di propinsi Sulawesi Utara tidak jauh berbeda dengan kasus di Nusa Tenggara Timur. Pada Model 3 dari 8 variabel Potensi Desa yang digunakan hanya ada 3 variabel yang

mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu kepadatan penduduk, jarak kantor desa ke kantor kabupaten/kota, serta keberadaan polindes.

Yang perlu dicermati adalah pengaruh keberadaan polindes yang bernilai negatif. Ini berarti rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin jauh lebih tinggi dari rata-rata pengeluaran rumah tangga tidak miskin. Dalam mengakses polindes rumah tangga miskin mendapat kesulitan karena lokasi jauh atau ketersediaan fasilitas minim di Sulawesi Utara, Model 1 dan 2 pengaruh sektor juga cukup dominan. Sektor industri berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara, dimana rata-rata pengeluaran rumah tangga miskin yang KRTnya bekerja di sektor industri lebih tinggi Rp. 13,029,- dibandingkan dengan rumah tangga yang KRTnya bekerja bukan di sektor industri.

d. MODEL PROPINSI GORONTALO

Model 1 hingga Model 3 Propinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada Model 1 hanya 7 variabel saja yang nyata dalam hubungannya dengan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan.

Tabel 4.9a:
Model 1 Propinsi Gorontalo

Nama Variabel	Variabel	Coef,	Std, Err,	[95% Conf, Interval]	
				(1)	(2)
Luas Lantai Per Kapita	pcfloor	139*	62	18	260
Pendidikan KRT	hheduc	4.322*	2.111	179	8.465
Jenis Dinding	twall	3.350*	1.579	252	6.449
Fasilitas BAB	toilet	6.428*	2.182	2.146	10.710
Sumber Air Minum	water	-3.142*	1.482	-6.050	-233
Sumber Penerangan	lighting	5.622**	1.573	2.534	8.709
Lapangan Usaha Pertanian	hhsector1	-5.146**	1.509	-8.107	-2.185
Konstanta	cons	112.201	1.628	109.005	115.396

Sumber: Data diolah

Keterangan:

R²Adjusted: 0.0905

Fhitung: 14.85

N observasi: 975

Pada Model 1, dari 8 variabel yang digunakan, 7 variabel ternyata berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga sebulan di Gorontalo. Empat variabel yang mempengaruhi pengeluaran per kapita sebulan di Gorontalo yaitu luas lantai per kapita, pendidikan KRT, fasilitas buang air besar, dan sektor pertanian ternyata sama pengaruhnya dengan kondisi di Sulawesi Utara. Ini berarti keempat variabel ini memang merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan di dua propinsi tersebut.

Tabel 4.9b:
Model 2 Propinsi Gorontalo

Nama Variabel (1)	Variabel (2)	Coef, (3)	Std, Err, (4)	[95% Conf, Interval]	
				(5)	(6)
Partisipasi Wanita dalam BerKB	wmn1049	3.556*	1.384	840	6.273
Jumlah ART 0-4 tahun	Age04	-2.182*	995	-4.135	-230
Jenis Dinding	twall	5.028*	1.473	2.136	7.919
Fasilitas BAB	toilet	8.202**	2.053	4.173	12.231
Sumber Air Minum	water	-3.283*	1.389	-6.009	-556
Sumber Penerangan	lighting	6.650**	1.470	3.765	9.536
Pendidikan KRT	hheduc	4.098*	1.982	209	7.988
Jumlah Art	Hhsize	-5.619**	495	-6.591	-4.647
Konstanta	cons	133.635	2.433	128.861	138.409

Sumber: Data diolah

Keterangan:

R2Adjusted: 0.1902

Fhitung: 29.59

N observasi: 975

Pola yang hampir sama juga terjadi pada Model 2 dimana variabel-variabel yang berpengaruh di Sulawesi Utara juga berpengaruh di Gorontalo.

Tabel 4.9c:
Model 3 Propinsi Gorontalo

Nama Variabel (1)	Variabel (2)	Coef, (3)	Std, Err, (4)	[95% Conf, Interval]	
				(5)	(6)
Keberadaan SMP	villsmp	3.547*	1.323	950	6.144
Partisipasi Wanita Dalam BerKB	wmn1049	3.723*	1.351	1.071	6.375
Jenis Dinding	twall	4.833*	1.440	2.006	7.660
Fasilitas BAB	toilet	7.927**	2.022	3.960	11.895
Jumlah Anak SMA	sschild	6.131*	2.631	968	11.294
Sumber Penerangan	lighting	4.223*	1.447	1.384	7.062
Keberadaan Pasar	villpmplace	6.335**	1.425	3.538	9.133

Nama Variabel	Variabel	Coef,	Std, Err,	[95% Conf, Interval]	
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lapangan Usaha Industri	hhsector2	6.403*	1.928	2.620	10.187
Lapangan Usaha Jasa	hhsector3	7.148**	1.922	3.376	10.919
Jenis Permukaan Jalan	villrtype	-4.209*	1.411	-6.979	-1.439
Jumlah Art	hhszise	-5.787**	486	-6.741	-4.833
Jumlah anak Usia 0-4 tahun	age04	-2.699*	985	-4.631	-767
Konstanta	cons	128.632	2.699	123.335	133.930

R2Adjusted: 0.2304

Fhitung: 25.30

N observasi: 975

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Model 3, di Gorontalo, ada 12 variabel dari 24 variabel yang nyata mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu keberadaan SMP, keberadaan pasar permanen, jenis dinding, fasilitas buang air besar, jenis jalan, penerangan, jumlah anak yang sekolah SMA, sektor jasa, sektor industri, partisipasi wanita dalam berKB, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah anak balita.

Dari Model ketiga dengan mengurutkan rumah tangga dari pengeluaran perkapita sebulan dari yang terkecil hingga yang terbesar didapatkan jumlah rumah tangga sesuai dengan target pemerintah yaitu sebanyak 97.760 rumah tangga sangat miskin.

Tabel 4.10:
Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin
Penerima BLT Yang Terpilih
untuk Program Bantuan PKH Tahap I

Propinsi	Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin berdasarkan Hasil Model 3
(1)	(2)
DKI Jakarta	6 704
Nusa Tenggara Timur	51 127
Sulawesi Utara	17 977
Gorontalo	21 952
Total	97 760

Sumber: Data diolah

Hasil dari Model 3 ini merupakan model yang ideal untuk PKH 2007/2008 karena pengaruh efek lokasi sudah masuk sehingga besaran *leakage* sudah mempertimbangkan pengaruh akses rumah tangga miskin di suatu lokasi.

4.4. Analisis Tingkat Keakuratan Sasaran

Hasil simulasi dengan model regresi didapatkan tingkat keakuratan sasaran yang bervariasi antara propinsi. Kesimpulan umum dari simulasi ini semua propinsi mengalami kebocoran anggaran (*leakage*) karena dana BLT diberikan bukan kepada rumah tangga miskin. Persentase rumah tangga tidak miskin yang mendapat bantuan BLT berkisar antara 0,10 persen hingga 56,00 persen. Tingkat kebocoran menurut propinsi dan model pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada Model 1 menghasilkan nilai yang terendah, yaitu hanya 0,10 terjadi di Nusa Tenggara Timur, sementara di Sulawesi Utara dan Gorontalo masing-masing sebesar 7,60 dan 8,40 persen. Sementara itu, berdasarkan Model 1 terdapat 15,20 persen rumah tangga yang tidak layak menerima BLT di DKI Jakarta tetapi menerima BLT pada tahun 2005. Model 1 menunjukkan dengan 8 variabel BLT, rumah tangga salah sasaran termasuk tinggi di DKI Jakarta.

Pada Model 2, tingkat kebocoran sebesar 6,80 persen terjadi di Nusa Tenggara Timur, dan di Sulawesi Utara sebesar 18,30. Pada Model 2 ternyata terjadi salah sasaran yang sangat tinggi yaitu di Gorontalo (40,30 persen) dan DKI Jakarta (56,0 persen).

Pada Model 3 terdapat tiga propinsi yang mempunyai *leakage* sangat tinggi yaitu DKI Jakarta (56 persen), Sulawesi Utara (26,40 persen), dan Gorontalo (45,30 persen).

Tabel 4.11:
Tingkat Kebocoran Pada Pemberian BLT 2005
Menurut Propinsi dan Model

Propinsi	MODEL 1		MODEL 2		MODEL 3	
	Cov	Leakage	Cov	Leakage	Cov	Leakage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	84,80	15,20	44,00	56,00	44,00	56,00
NTT	99,90	0,10	93,20	6,80	94,80	5,20
Sulawesi Utara	92,40	7,60	81,70	18,30	73,60	26,40
Gorontalo	91,60	8,40	59,70	40,30	54,70	45,30

Sumber: Data diolah

Keterangan:

Cov adalah coverage yaitu jumlah penerima BLT yang miskin dan mendapatkan BLT

Leakage adalah rumah tangga tidak miskin yang mendapatkan BLT

4.5. Analisis Indikator Kemiskinan

Tabel 4.12 menampilkan hasil penghitungan *poverty gap index* dan *squared poverty gap index* dari data BLT yang sudah diestimasi pengeluaran rumah tangganya¹. Berdasarkan Model 1 ternyata *poverty gap index* tertinggi terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar 23,90. Ini berarti pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan pada rumah tangga di Nusa Tenggara sangat jauh dari Garis Kemiskinan 2006 yang telah direvisi.

Sementara itu, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo masing-masing sebesar 3,0; 8,60; dan 7,70. Jika dibandingkan secara relatif pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan di DKI Jakarta lebih dekat dengan garis kemiskinan dibandingkan dengan Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pola yang sama juga terjadi pada Model 2 dan Model 3, yaitu nilai *poverty gap index* di propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan yang tertinggi.

Untuk melihat tingkat keparahan dapat digunakan *squared poverty gap index*. Nilai indeks ini juga sangat tinggi di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 3,40 hingga 6,10. Sementara itu nilai indeks ini untuk 3 propinsi lainnya sangat rendah yaitu hanya

¹ Prosedur FGT dapat dilihat pada Lampiran 4.

antara 0,20 hingga 0,40 di DKI Jakarta, antara 1,00 hingga 1,10 di Sulawesi Utara, dan antara 0,80 hingga 1,80 di Gorontalo. Ini menunjukkan bahwa Nusa Tenggara mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih parah dibandingkan dengan 3 propinsi lainnya.

Tabel 4.12:
Indikator Kemiskinan Data Rumah Tangga Penerima BLT 2005

Propinsi	Indikator	MODEL 1	MODEL 2	MODEL 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	P1	3,0	2,90	2,90
	P2	0,20	0,40	0,40
Nusa Tenggara Timur	P1	23,90	16,60	17,90
	P2	6,10	3,40	3,80
Sulawesi Utara	P1	8,60	7,70	7,10
	P2	1,00	1,10	1,00
Gorontalo	P1	7,70	5,80	5,70
	P2	0,80	1,70	1,80

Sumber: Data diolah

Keterangan:

P1= *Poverty Gap Index*

P2= *Squared Poverty Gap Index*

4.6. Besarnya Uang Yang Salah Sasaran

Dalam kaitan dengan ilmu ekonomi publik, maka besarnya kebocoran akibat masuknya rumah tangga tidak miskin dalam pemberian bantuan pada program BLT merupakan kajian yang perlu ditegaskan. Tabel 4.13 menunjukkan jumlah rumah tangga yang salah sasaran serta besarnya uang yang salah sasaran menurut propinsi dan model.

Pada Model 1 sebanyak 43.320 rumah tangga salah sasaran dari 1.013.643 rumah tangga yang diteliti pada empat propinsi. Sementara pada Model 2 dan Model 3 masing-masing sebanyak 196.938 rumah tangga dan 202.415 rumah tangga.

Secara total, dari 4 propinsi yang diteliti uang salah sasaran menurut Model 1, 2, dan 3 adalah masing-masing sebesar Rp 51 milyar, Rp 236 milyar, dan Rp 242 milyar,

dimana uang yang salah sasaran di DKI Jakarta merupakan yang terbesar yaitu sebesar Rp 29 milyar pada Model 1, sebesar Rp 107 milyar pada Model 2, dan sebesar Rp 107 milyar pada Model 3. Lihat Tabel 4.13.

Tabel 4.13:
Jumlah RT dan Uang Salah Sasaran Pemberian BLT 2005
Menurut Propinsi dan Model

Propinsi	Jumlah RT Salah Sasaran			Uang Salah Sasaran (Jutaan Rupiah)		
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 1	Model 2	Model 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DKI Jakarta	24,393	89,869	89,869	29,272	107,843	107,843
Nusa Tenggara Timur	623	42,373	32,403	748	50,848	38,884
Sulawesi Utara	9,674	23,295	33,606	11,609	27,954	40,327
Gorontalo	8,629	41,401	46,537	10,355	49,681	55,845
Jumlah	43,320	196,938	202,415	51,984	236,325	242,898

Sumber: data diolah

4.7. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah pada jumlah variabel yang digunakan dalam Model 1 yaitu hanya mencakup delapan variabel dari 14 variabel yang digunakan dalam penentuan skoring rumah tangga penerima BLT 2005. Ada enam variabel BLT yang tidak terdapat dalam Susenas Kor 2006 yaitu (1) jenis bahan bakar untuk masak, (2) frekuensi rumah tangga membeli daging/ayam/susu dalam satu minggu, (3) frekuensi makan sehari, (4) banyaknya pakaian baru yang bisa dibeli dalam setahun, (5) mampu berobat ke puskesmas bila sakit, dan (6) kepemilikan barang bernilai paling sedikit Rp 500 ribu.

Di samping itu, penelitian ini tidak dapat menangkap berapa sesungguhnya rumah tangga miskin yang belum tercover dalam pendataan PSE 2005, oleh karena penelitian ini hanya didasarkan pada asumsi bahwa semua rumah tangga miskin sudah terdata dalam pelaksanaan PSE 2005. Penelitian ini juga tidak dapat menunjukkan apakah rumah tangga miskin yang menerima BLT pada 2005 sudah terlepas dari

lingkaran kemiskinan atau belum. Atau dengan kata lain, tidak ditujukan untuk menangkap dampak pemberian BLT terhadap tingkat kesejahteraan mereka.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain - yang juga menggunakan PMT di negara lain - adalah penelitian ini dapat menunjukkan secara pasti rumah tangga yang layak dan tidak layak menerima bantuan, sementara penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada besarnya manfaat yang didapat per rumah tangga serta efek perubahan tingkat kemiskinan sebelum dan setelah pemberian bantuan.

Di samping itu, model dalam penelitian ini masih dianggap mengalami *selectivity bias* karena rumah tangga yang diambil dari Susenas tidak dirancang untuk dipilih berdasarkan rumah tangga miskin dan tidak miskin, tetapi hanya berdasarkan golongan pengeluaran saja.

Disamping itu, penelitian ini belum mampu membedakan salah sasaran menurut perkotaan dan perdesaan karena tidak tersedianya informasi tentang klasifikasi daerah dalam kegiatan PSE 2005.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Model 1 menunjukkan bahwa terjadi salah sasaran (*leakage*) sebesar 0,10 persen di Propinsi Nusa Tenggara Timur (setara dengan 748 juta), sebesar 7,60 persen di Sulawesi Utara (setara dengan 12 milyar), sebesar 8,40 persen di Gorontalo (setara dengan 10 milyar), dan sebesar 15,20 persen di DKI Jakarta (setara dengan 29 milyar).
2. Model 2 menunjukkan bahwa terjadi salah sasaran (*leakage*) sebesar 6,80 persen di Propinsi Nusa Tenggara Timur (setara dengan 51 milyar), sebesar 18,30 persen di Sulawesi Utara (setara dengan 27 milyar), sebesar 40,30 persen di Gorontalo (setara dengan 50 milyar), dan sebesar 56,00 persen di DKI Jakarta (setara dengan 107 milyar).
3. Model 3 menunjukkan bahwa terjadi salah sasaran (*leakage*) sebesar 5,20 persen di Propinsi Nusa Tenggara Timur (setara dengan 38 milyar), sebesar 26,40 persen di Sulawesi Utara (setara dengan 40 milyar), sebesar 43,30 persen di Gorontalo (setara dengan 55 milyar), dan sebesar 56,00 persen di DKI Jakarta (setara dengan 107 milyar).
4. Di samping itu, sesuai dengan tujuan ketiga, dengan Model 3 dapat diketahui pula determinan kemiskinan atau variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 4 propinsi yang diteliti. Di DKI Jakarta, dari 25 variabel yang digunakan hanya 4 variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu sumber penerangan, jumlah anggota rumah tangga, jenis dinding, dan fasilitas buang air besar.

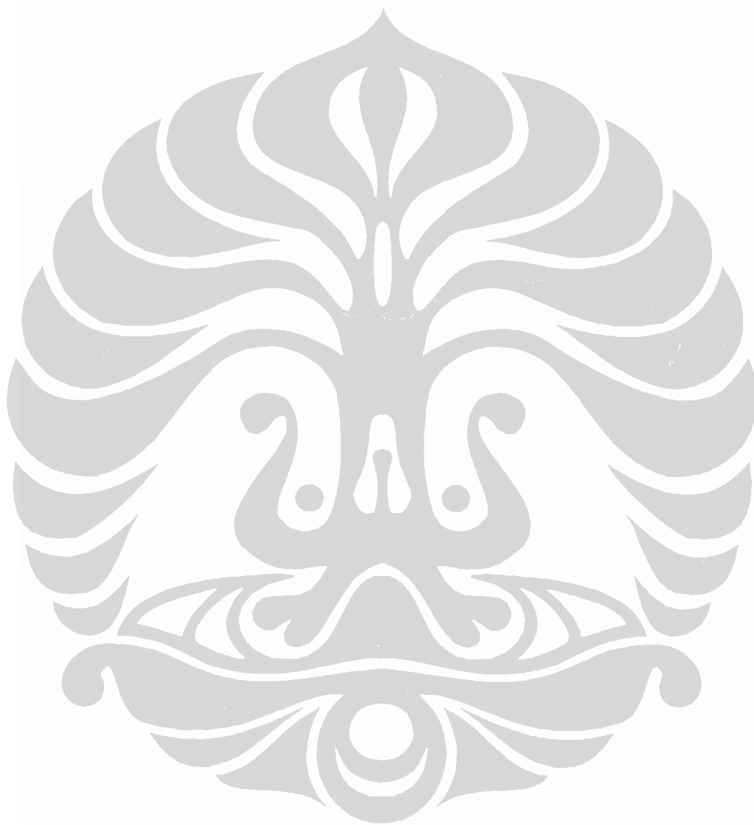
5. Di Nusa Tenggara Timur, dari 25 variabel yang digunakan ada 14 variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu luas lantai perkapita, jenis lantai, kepadatan penduduk, fasilitas buang air besar, partisipasi wanita dalam berKB, sumber penerangan, lapangan usaha KRT di sektor pertanian, jenis permukaan jalan, lapangan usaha KRT di sektor jasa, pendidikan KRT, jumlah anggota rumah tangga, jumlah anak yang sekolah SMA, keberadaan bidan, dan jarak ke kantor desa.
6. Di Sulawesi Utara, dari 25 variabel yang digunakan ada 11 variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu luas lantai perkapita, kepadatan penduduk, jarak ke kantor desa, keberadaan polindes, fasilitas buang air besar, jumlah anak yang sekolah SMP, penerangan, sektor jasa, sektor industri, pendidikan KRT, dan jumlah anggota rumah tangga.
7. Di Gorontalo, dari 25 variabel yang digunakan ada 12 variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu keberadaan SMP, keberadaan pasar permanen, jenis dinding, fasilitas buang air besar, jenis jalan, penerangan, jumlah anak yang sekolah SMA, sektor jasa, sektor industri, partisipasi wanita dalam berKB, jumlah anggota rumah tangga, dan jumlah anak balita.

5.2. Saran

1. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan *targeting* rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008.
2. Terkait dengan program PKH, pemerintah harus dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mereka. Variabel-variabel penting yang sudah ditentukan

berdasarkan model perlu diverifikasi di lapangan sebelum pemberina bantuan. Sementara itu, pengeluaran rumah tangga per kapita yang sudah dihitung dari model perlu dicek kembali dengan suatu survei khusus.

3. Perlu dilakukan penghitungan kembali salah sasaran dengan menggunakan 14 (empat belas) variabel yang sama dengan BLT dengan mengumpulkan data yang sejenis pada Susenas-Susenas berikutnya, serta perhitungan salah sasaran sebaiknya dibedakan menurut perkotaan dan perdesaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adityaswara, Mirza, 2004, *Urgensi Pendanaan Infrastruktur*, Harian Kompas, 18 Februari, 2004
- Alex Octavianus, 2005, *Pengaruh Ketersediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota*, Tesis S2 Universitas Andalas, Sumatera Barat
- Ali, L, dan E, Pernia, 2003, *Infrastructure and Poverty Reduction: What is the Connection?*, ERD Policy Brief, No. 13, Economics and Research Departmen Asian Development Bank, Asian Development Bank
- Atawolo, Petrus Toda, Irfan Islamy, dan Irwan Noor, 2001, *Pola Bertahan Hidup Masyarakat Miskin Pedesaan Pantai*, Wacana PPS Unibraw, Vol 3 No 2 Januari 2001
- Badan Pusat Statistik, 1999, *Perkembangan dan Dimensi Kemiskinan, Survei Seratus Desa, Seri SSD No, 3*, BPS dan UNICEF, Jakarta
- , 2002, *Dasar-dasar Analisa Kemiskinan*, BPS dan World Bank, Jakarta
- , 2004, *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004: Buku 1 Propinsi*, BPS, Jakarta
- , 2005, *Metodologi Penentuan Rumah Tangga Miskin Berdasarkan PSE2005*, tidak dipublikasikan,
- , 2006a, *Analisis Dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006*, BPS, Jakarta
- , 2006b, *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006: Buku 1: Propinsi*, BPS, Jakarta
- , 2007a, *Survei pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan 2007, Buku 1: Laporan Teknis Pelaksanaan*, BPS Jakarta
- , 2007b, *Upaya Pemanfaatan Dan Evaluasi Program Pelayanan Sosial Ibu dan Anak Melalui Indikator Pembangunan Milenium di Indonesia*, BPS Jakarta
- Bappenas, 2003, *Sistem Data dan Penentuan Sasaran (Targeting) Dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Bappenas, Jakarta
- Coady, David, M, Grosh, J, Hoddinott (2002), *The Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of Experience and Lessons*, mimeo, The World Bank, Washington DC
- Deaton, A, and S, Zaidi (1999), *Guidelines for Constructing Consumption Aggregated for Welfare Analysis*, World Bank, Washington DC,
- Deaton, A, (2003), *Prices and Poverty in India, 1987-2000*, *Economic and Political Weekly*, January 25 issue
- Esmara, Hendra 1986, *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta

- Filmer, D, and L, Pritchett (2001), *Estimating Wealth Effects Without Expenditure Data or Tear: An Application to Educational Enrollments in States of India*", *Demography* 38(1): 115-132
- Hartono, Djoni, 2002, *Analisis Dampak Kebijakan Harga Energi Terhadap Perekonomian dan Distribusi Pendapatan di DKI Jakarta: Pendekatan Computable General Equilibrium*, Tesis, Program Pascasarjana Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta,
- Grosh, Margaret E dan Baker, Judy L, 1995, *Proxy Means Tests for Targetting Social Programs: Simulations dan Speculation*, Living Standard Measurement Study World Bank Working Paper No 118,
- Gujarati, Damodar N (1995), *Basic Econometrics*, 3th Edition, MC Graw Hill, Inc, Singapore
- Ichimura, S (1989), *Pembangunan Ekonomi Indonesia, Masalah dan Analisa*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Jyotsna Jalan dan Rinku Murgai, *An Effective "Targeting Shortcut"? An Assessment of the 2002 Below-Poverty Line Census Method*, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta
- Krisnamurthi, Bayu, 2003, *Agenda Pemberdayaan Petani Dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional*, *Jurnal Ekonomi Rakyat* Tahun II, No 7, Oktober 2003
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan, YPKN
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT Pustaka, CIDESINDO
- Krisnamurthi, Bayu, 2003, *Agenda Pemberdayaan Petani Dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan*, *Jurnal Ekonomi rakyat*, Tahun II No 7 Oktober 2003
- Kuncoro, Mudrajad, 1997, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YPKN
- M Ikhsan, et al, 2005, *Kajian Dampak Kenaikan Harga BBM 2005 Terhadap Kemiskinan*, Draft Working paper, LPEM, FEUI, Jakarta
- Narayan, Depa et, al, 2002, *Can Anyone HearUus? Voice of the Poor*, Oxford University Press, Inc
- Narayan, Ambar dan Nobua Yoshida, 2003, *Proxy Means Test for Targetting Welfare Benefits in Sri Lanka, 2003*, South Asia Poverty Reduction dan Economic Management
- Nachrowi, D Nachrowi dan Hardius Usman, 2002, *Penggunaan Teknik Ekonometri: Pendekatan Populer, Praktis Dilengkapi Teknik Analisis dan Pengolahan Data Dengan Menggunakan Paket Program SPSS*, PT Raja Grafindo ersada, Jakarta
- Pritchett, Lant, S, Sumarto, A, Suryahadi (2002), *Targeted programs in an Economic Crisis: Empirical Findings from the experience of Indonesia*, SMERU Working Paper

- Ravallion, M (1992), *Poverty Comparisons: A Guide to Concepts and Methods*, World Bank, Washington DC,
- Sumarto, Sudarno, (2002), *Growth, Inequality, and Poverty: Evidence from Microdata*, Makalah dalam The Young Economist Seminar, World Bank
- Sudarno Sumarto dan Asep Suharyadi, 2001, *Principles and Approaches to Targeting with Reference to The Indonesia Social Safety Net Programms*, Smeru Working Paper, Jakarta
- Strauss, John, et al, (2002), *Indonesian Living Standards Three Year After The Crisis: Evidence from The IFLS*, Laporan penelitian yang dibiayai oleh World Bank
- Saadah, Fadia, M, Pradhan and Robert Sparrow (2002), *The Effectiveness of Healthcard as an Instrument to Ensure Access to Medical Care for the Poor during the Crisis*, mimeo, The World Bank, Washington DC
- Skoufias, E, and D, Coady (2002), *Are the Welfare Losses from Imperfect Targeting Important?*, FCND Discussion Paper No, 125, International Food Policy Research Institute, Washington DC
- Srivastava, P (2004), *Rural Finance and Development in UP: A Case Study of Three Villages*, National Council of Applied Economic Research, mimeo,
- Sundaram, K, (2003), *On Identification of Households Below Poverty Line: Some Comments on the Proposed Methodology*, *Economic and Political Weekly*, March 1 issue
- Taufur, Werry Darta, 2005, *Kemiskinan Mengikut Sektor Pekerjaan dan Daerah di Propinsi Sumatera Barat*, Tesis Doktor falsafah, fakulti Ekonomi dan Pentabdiran Universiti Malaya
- Todaro, Michael P, 1997, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi ke-4, Jilid I, Erlangga
- Widodo, Hg, Suseno Triyono (1991), *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Wiratno, Masykur (1992), *Ekonomi Pembangunan: Ikhtisar Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Media Widya Mandala, Yogyakarta



CONTOH LISTING PROGRAM PMT DKI JAKARTA

MODEL 1

```
clear
set mem 256m
set more off

cap log close

log using dki1,replace text

use model06p31 all,clear

#d ;

sw regress pcexp pcfloor tfloor twall toilet water lighting hhsector1 hheduc, pr(.05);

predict yhat1 ;

#delimit cr
predict Yhat

use rkl31gab,clear
do bltregist
bltregist

sort b1r1-b1r3 BltExp
by b1r1-b1r3 : gen BltSample=_n
by b1r1-b1r3 : cumul BltExp, gen(BltPctn)
replace BltPctn=BltPctn*100
compress

keep b1r* nurt YHatBlt BltExp BltSample BltPctn

save MODEL1P31,replace

clear

log close
```

MODEL 2

```
clear
set mem 256m
set more off
```

```
cap log close
```

```
log using dki2,replace text
```

```
use model06p31all,clear
```

```
#d ;
```

```
sw regress pcexp pcfloor tfloor twall toilet water lighting hhsector1-hhsector3 hheduc
hhsz
```

```
age04 eschild jschild sschild wmn1049 credit, pr(.05);
predict yhat1 ;
```

```
#delimit cr
predict Yhat
```

```
use rkls31gab,clear
do bltregist
bltregist
```

```
sort b1r1-b1r3 BltExp
by b1r1-b1r3 : gen BltSample=_n
by b1r1-b1r3 : cumul BltExp, gen(BltPctn)
replace BltPctn=BltPctn*100
compress
```

```
keep b1r* nurt YHatBlt BltExp BltSample BltPctn
```

```
save MODEL2P31,replace
```

```
clear
```

```
log close
```

MODEL 3

```
clear
set mem 256m
set more off
```

```
cap log close
```

```

log using dki3,replace text

use model06p31all,clear

#d ;

sw regress pcexp pcfloor tfloor twall toilet water lighting hhsector1-hhsector3 hheduc
hhsize age04 eschild jschild sschild wmn1049 credit villpdens vill2dist villsd villsmv
villpolin villbidan villrtype villpmlace, pr(.05) ;
predict yhat1 ;

#delimit cr
predict Yhat

use rkls31gab,clear
do bltregist
bltregist

sort blr1-blr3 BltExp
by blr1-blr3 : gen BltSample=_n
by blr1-blr3 : cumul BltExp, gen(BltPctn)
replace BltPctn=BltPctn*100
compress

keep blr* nurt YHatBlt BltExp BltSample BltPctn

save MODEL3P31,replace

clear

log close

```

PROSEDUR POST ESTIMATE

```
/* This program is to create the predicted expenditure from Susenas Model */  
cap program drop bltregest
```

```
program define bltregest  
  * Capture coefficient from regression model  
  matrix a=e(b)  
  
  * Initial value for independent variables  
  local indep = colsof(a)  
  
  * Create coefficient matrix as much as value of independent variables  
  matrix b=a[1,..`indep']  
  
  * Capture variance from regression model  
  matrix x=e(V)  
  
  * Create variance matrix as much as dependent variables  
  matrix V=x[1..`indep',1..`indep']  
  
  * Post estimate to BLT data  
  ereturn post b V  
  
  * Predict the beta*X BLT characteristics  
  predict YHatBlT,xb  
  
  gen BltExp=YHatBlT  
end
```

MODEL PMT DKI JAKARTA

MODEL 1

Source	SS	df	MS	Number of obs =	732
Model	2.5526e+10	3	8.5088e+09	F(3, 728) =	6.15
Residual	1.0079e+12	728	1.3845e+09	Prob > F =	0.0004
				R-squared =	0.0247
				Adj R-squared =	0.0207
Total	1.0334e+12	731	1.4137e+09	Root MSE =	37208

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
hheduc	6570.213	2794.86	2.35	0.019	1083.266	12057.16
lighting	43745.87	21584.93	2.03	0.043	1369.74	86121.99
twall	7695.119	3050.395	2.52	0.012	1706.499	13683.74
_cons	192586.3	21506.27	8.95	0.000	150364.6	234808

MODEL 2

Source	SS	df	MS	Number of obs =	732
Model	1.5100e+11	4	3.7749e+10	F(4, 727) =	31.10
Residual	8.8242e+11	727	1.2138e+09	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.1461
				Adj R-squared =	0.1414
Total	1.0334e+12	731	1.4137e+09	Root MSE =	34839

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
hhszise	-8195.799	787.8605	-10.40	0.000	-9742.552	-6649.046
lighting	43760.84	20186.06	2.17	0.030	4130.909	83390.78
twall	10751.5	2968.355	3.62	0.000	4923.926	16579.07
toilet	8538.717	2740.622	3.12	0.002	3158.24	13919.19
_cons	232432.2	20525.74	11.32	0.000	192135.4	272729

MODEL 3

Source	SS	df	MS	Number of obs =	732
Model	1.5100e+11	4	3.7749e+10	F(4, 727) =	31.10
Residual	8.8242e+11	727	1.2138e+09	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.1461
				Adj R-squared =	0.1414
Total	1.0334e+12	731	1.4137e+09	Root MSE =	34839

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
lighting	43760.84	20186.06	2.17	0.030	4130.909	83390.78
hhszise	-8195.799	787.8605	-10.40	0.000	-9742.552	-6649.046
twall	10751.5	2968.355	3.62	0.000	4923.926	16579.07
toilet	8538.717	2740.622	3.12	0.002	3158.24	13919.19
_cons	232432.2	20525.74	11.32	0.000	192135.4	272729

MODEL PMT NUSA TENGGARA TIMUR

MODEL 1

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2014
Model	1.6143e+11	7	2.3062e+10	F(7, 2006) =	77.08
Residual	6.0021e+11	2006	299207298	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.2120
				Adj R-squared =	0.2092
Total	7.6164e+11	2013	378361139	Root MSE =	17298

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pcfloor	106.0082	45.1894	2.35	0.019	17.38514	194.6313
tfloor	3402.367	842.4704	4.04	0.000	1750.159	5054.576
twall	-2188.931	1104.959	-1.98	0.048	-4355.919	-21.94298
toilet	-2047.032	802.099	-2.55	0.011	-3620.066	-473.9974
hheduc	5409.415	1038.448	5.21	0.000	3372.865	7445.964
lighting	11396.47	1027.807	11.09	0.000	9380.785	13412.15
hhsector1	-10362.72	1031.159	-10.05	0.000	-12384.97	-8340.461
_cons	93743.07	1193.643	78.54	0.000	91402.16	96083.98

MODEL 2

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2014
Model	1.9497e+11	9	2.1663e+10	F(9, 2004) =	76.61
Residual	5.6667e+11	2004	282769434	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.2560
				Adj R-squared =	0.2526
Total	7.6164e+11	2013	378361139	Root MSE =	16816

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
hhszise	-1501.611	212.2922	-7.07	0.000	-1917.947	-1085.274
tfloor	3502.452	816.6311	4.29	0.000	1900.917	5103.986
hheduc	2739.237	1046.217	2.62	0.009	687.4496	4791.024
toilet	-2228.528	778.4351	-2.86	0.004	-3755.154	-701.901
wmn1049	2732.9	882.3308	3.10	0.002	1002.518	4463.281
lighting	9671.338	996.7228	9.70	0.000	7716.617	11626.06
hhsector1	-5589.83	1174.876	-4.76	0.000	-7893.937	-3285.724
sschild	6048.273	1281.465	4.72	0.000	3535.129	8561.417
hhsector3	12167.26	1709.736	7.12	0.000	8814.217	15520.31
_cons	98058.43	1705.219	57.50	0.000	94714.24	101402.6

MODEL 3

Source	SS	df	MS	Number of obs =	2014
Model	2.6267e+11	14	1.8762e+10	F(14, 1999) =	75.17
Residual	4.9897e+11	1999	249610002	Prob > F =	0.0000
				R-squared =	0.3449
				Adj R-squared =	0.3403
Total	7.6164e+11	2013	378361139	Root MSE =	15799

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pcfloor	92.08064	41.83165	2.20	0.028	10.04245	174.1188
tfloor	2527.259	773.3871	3.27	0.001	1010.53	4043.988
villpdens	3.073495	.2407257	12.77	0.000	2.601396	3.545595
toilet	-1815.534	734.2995	-2.47	0.014	-3255.607	-375.462
wmn1049	1925.444	831.4516	2.32	0.021	294.8414	3556.046
lighting	5137.937	991.0257	5.18	0.000	3194.385	7081.488
hhsector1	-2399.943	1123.315	-2.14	0.033	-4602.934	-196.9519
villrtype	-4011.644	839.7759	-4.78	0.000	-5658.572	-2364.716
hhsector3	6016.179	1658.014	3.63	0.000	2764.564	9267.795
hheduc	3041.72	984.3612	3.09	0.002	1111.238	4972.201
hhszise	-1403.522	203.8962	-6.88	0.000	-1803.394	-1003.651
sschild	3927.354	1214.217	3.23	0.001	1546.091	6308.616
villbidan	2046.52	964.8464	2.12	0.034	154.3099	3938.73
vill2dist	-50.71585	12.9457	-3.92	0.000	-76.10433	-25.32737
_cons	97594.78	1988.129	49.09	0.000	93695.76	101493.8

MODEL PMT SULAWESI UTARA

MODEL 1

Source	SS	df	MS	Number of obs = 1215		
Model	9.2027e+10	5	1.8405e+10	F(5, 1209) =	24.89	
Residual	8.9413e+11	1209	739560292	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.0933	
				Adj R-squared =	0.0896	
Total	9.8616e+11	1214	812319431	Root MSE =	27195	

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pcfloor	617.7768	127.8481	4.83	0.000	366.948	868.6057
lighting	6146.417	2466.09	2.49	0.013	1308.127	10984.71
hhsector1	-11551.68	1650.995	-7.00	0.000	-14790.81	-8312.542
toilet	4054.255	1622.331	2.50	0.013	871.3585	7237.152
hheduc	6017.309	1629.612	3.69	0.000	2820.128	9214.49
_cons	139066.7	2860.643	48.61	0.000	133454.3	144679.1

MODEL 2

Source	SS	df	MS	Number of obs = 1215		
Model	1.3447e+11	8	1.6808e+10	F(8, 1206) =	23.80	
Residual	8.5169e+11	1206	706209480	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.1364	
				Adj R-squared =	0.1306	
Total	9.8616e+11	1214	812319431	Root MSE =	26575	

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pcfloor	305.2614	132.4006	2.31	0.021	45.5002	565.0226
hheduc	4969.199	1610.064	3.09	0.002	1810.362	8128.037
hhszise	-4713.212	595.5193	-7.91	0.000	-5881.581	-3544.843
toilet	5511.643	1598.565	3.45	0.001	2375.365	8647.921
jschild	3925.6	1761.414	2.23	0.026	469.8245	7381.375
lighting	7485.916	2422.012	3.09	0.002	2734.09	12237.74
hhsector3	13029.02	2278.256	5.72	0.000	8559.233	17498.8
hhsector2	12257.27	2232.957	5.49	0.000	7876.357	16638.18
_cons	149790.7	3660.733	40.92	0.000	142608.6	156972.8

MODEL 3

Source	SS	df	MS			
Model	2.0812e+11	11	1.8920e+10	Number of obs =	1215	
Residual	7.7804e+11	1203	646746700	F(11, 1203) =	29.25	
Total	9.8616e+11	1214	812319431	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.2110	
				Adj R-squared =	0.2038	
				Root MSE =	25431	

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pcfloor	432.658	127.3604	3.40	0.001	182.7848	682.5312
villpdens	1.486429	.2392557	6.21	0.000	1.017024	1.955834
vill2dist	-65.4449	26.5524	-2.46	0.014	-117.5391	-13.35074
toilet	4493.76	1563.5	2.87	0.004	1426.271	7561.249
villpolin	-10691.44	1647.101	-6.49	0.000	-13922.95	-7459.927
lighting	5515.761	2325.182	2.37	0.018	953.8986	10077.62
jschild	4505.148	1687.653	2.67	0.008	1194.077	7816.219
hhsector2	7546.83	2199.429	3.43	0.001	3231.686	11861.97
hhsector3	6493.605	2271.935	2.86	0.004	2036.209	10951
hheduc	4937.2	1542.895	3.20	0.001	1910.136	7964.263
hhsize	-4938.404	571.6366	-8.64	0.000	-6059.92	-3816.888
_cons	157802	3736.897	42.23	0.000	150470.5	165133.6

MODEL PMT GORONTALO

MODEL 1

Source	SS	df	MS			
Model	4.7539e+10	7	6.7913e+09	Number of obs =	975	
Residual	4.4215e+11	967	457234605	F(7, 967) =	14.85	
Total	4.8968e+11	974	502756567	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.0971	
				Adj R-squared =	0.0905	
				Root MSE =	21383	

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pcfloor	139.3572	61.72141	2.26	0.024	18.2339	260.4806
hheduc	4322.425	2111.178	2.05	0.041	179.4077	8465.443
twall	3350.476	1578.905	2.12	0.034	252.0009	6448.951
toilet	6428.196	2181.983	2.95	0.003	2146.227	10710.16
water	-3141.555	1481.908	-2.12	0.034	-6049.681	-233.4287
lighting	5621.506	1573.257	3.57	0.000	2534.114	8708.897
hhsector1	-5146.052	1508.994	-3.41	0.001	-8107.333	-2184.772
_cons	112200.6	1628.219	68.91	0.000	109005.4	115395.9

MODEL 2

Source	SS	df	MS			
Model	9.6380e+10	8	1.2048e+10	Number of obs =	975	
Residual	3.9330e+11	966	407147797	F(8, 966) =	29.59	
Total	4.8968e+11	974	502756567	Prob > F =	0.0000	
				R-squared =	0.1968	
				Adj R-squared =	0.1902	
				Root MSE =	20178	

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
wmn1049	3556.434	1384.171	2.57	0.010	840.1041	6272.763
age04	-2182.298	994.8554	-2.19	0.029	-4134.625	-229.9714
twall	5027.525	1473.499	3.41	0.001	2135.898	7919.152
toilet	8201.811	2053.217	3.99	0.000	4172.53	12231.09
water	-3282.718	1389.306	-2.36	0.018	-6009.123	-556.3124
lighting	6650.448	1470.37	4.52	0.000	3764.961	9535.935
hheduc	4098.491	1981.748	2.07	0.039	209.4624	7987.519
hhsz	-5619.178	495.2764	-11.35	0.000	-6591.12	-4647.236
_cons	133635	2432.597	54.94	0.000	128861.2	138408.7

MODEL 3

Source	SS	df	MS	Number of obs = 975	
Model	1.1746e+11	12	9.7880e+09	F(12, 962) =	25.30
Residual	3.7223e+11	962	386932765	Prob > F =	0.0000
Total	4.8968e+11	974	502756567	R-squared =	0.2399
				Adj R-squared =	0.2304
				Root MSE =	19671

pcexp	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
villsmp	3547.157	1323.359	2.68	0.007	950.1545	6144.16
wmn1049	3722.933	1351.35	2.75	0.006	1070.999	6374.866
twall	4832.857	1440.406	3.36	0.001	2006.156	7659.558
toilet	7927.441	2021.888	3.92	0.000	3959.62	11895.26
sschild	6130.527	2630.924	2.33	0.020	967.514	11293.54
lighting	4222.806	1446.635	2.92	0.004	1383.883	7061.73
villpmplace	6335.178	1425.497	4.44	0.000	3537.736	9132.621
hhsector2	6403.497	1928.118	3.32	0.001	2619.694	10187.3
hhsector3	7147.76	1921.792	3.72	0.000	3376.371	10919.15
villrtype	-4209.229	1411.461	-2.98	0.003	-6979.127	-1439.332
hhsz	-5787.268	486.0673	-11.91	0.000	-6741.143	-4833.394
age04	-2699.352	984.5045	-2.74	0.006	-4631.376	-767.3277
_cons	128632	2699.463	47.65	0.000	123334.5	133929.6

PROSEDUR MENGHITUNG INDIKATOR KEMISKINAN DATA BLT

log using fgtmodel1.txt, text replace

* DKI

use model1p31, clear
FGT BltExp, line(248024) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp

* NTT

use model1p53, clear
FGT BltExp, line(115203) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp

* Sulawesi Utara

use model1p71, clear
FGT BltExp, line(155061) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp

* Gorontalo

use model1p75, clear
FGT BltExp, line(122286) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp

log close

log using fgtmodel2.txt, text replace

* DKI

use model2p31, clear
FGT BltExp, line(248024) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp

* NTT

use model2p53, clear
FGT BltExp, line(115203) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp

* Sulawesi Utara

```
use model2p71, clear
FGT BltExp, line(155061) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp
```

* Gorontalo

```
use model2p75, clear
FGT BltExp, line(122286) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp
```

log close

log using fgtmodel3.txt, text replace

* DKI

```
use model3p31, clear
FGT BltExp, line(248024) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp
```

* NTT

```
use model3p53, clear
FGT BltExp, line(115203) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp
```

* Sulawesi Utara

```
use model3p71, clear
FGT BltExp, line(155061) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp
```

* Gorontalo

```
use model3p75, clear
FGT BltExp, line(122286) fgt0 fgt1 fgt2
sum BltExp
```

log close